

di SD'Aisyiyah Kota Sukabumi dan SD'Aisyiyah *Islamic Centre* Cianjur ?

3. Bagaimana implementasi strategi kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran ramah anak berbasis pendidikan untuk semua di SD'Aisyiyah Kota Sukabumi dan SD'Aisyiyah *Islamic Centre* Cianjur ?
4. Bagaimana evaluasi strategi kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran ramah anak berbasis pendidikan untuk semua di SD'Aisyiyah Kota Sukabumi dan SD'Aisyiyah *Islamic Centre* Cianjur ?
5. Apa hambatan strategi kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran ramah anak berbasis pendidikan untuk semua di SD'Aisyiyah Kota Sukabumi dan SD'Aisyiyah *Islamic Centre* Cianjur ?
6. Bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan strategi kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran ramah anak berbasis pendidikan untuk semua di SD'Aisyiyah Kota Sukabumi dan SD'Aisyiyah *Islamic Centre* Cianjur?

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PEMBELAJARAN RAMAH ANAK BERBASIS PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

A. Landasan Filsafat

Filsafat pendidikan memberikan kerangka ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam merumuskan arah, tujuan, dan pelaksanaan praktik pembelajaran. Salah satu aliran filsafat yang paling relevan dalam mendasari pendekatan pembelajaran ramah anak adalah filsafat humanisme. Humanisme memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat, kehendak bebas, kemampuan berpikir, dan potensi untuk berkembang secara menyeluruh. Dalam konteks pendidikan, aliran ini menghendaki terciptanya lingkungan belajar yang menghargai keunikan individu, mendorong pertumbuhan personal, serta menjadikan siswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran.

Maslow (1970) yang dikutip oleh Hena (2023) mengemukakan teori hierarki kebutuhan, yang menegaskan bahwa kebutuhan dasar seperti rasa aman dan dihargai harus terpenuhi sebelum anak mampu mencapai potensi puncaknya dalam pembelajaran.

Filsafat humanisme sangat selaras dengan prinsip-prinsip pembelajaran ramah anak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak, membuat lingkungan aman secara fisik dan psikologis, Tanpa tindakan kekerasan serta menjamin anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Pembelajaran ramah anak tidak hanya memperhatikan aspek kognitif, namun juga mempertimbangkan aspek afektif dan sosial dari anak-anak, sejalan dengan tujuan humanistik yang menempatkan kesejahteraan emosional peserta didik sebagai prioritas utama.

Lebih lanjut, pendekatan humanistik dalam pembelajaran menolak model otoriter dan satu arah, yang seringkali menempatkan guru sebagai pusat

pengetahuan dan anak sebagai objek pasif. Sebaliknya, pendekatan ini menekankan proses dialogis, pemberdayaan, dan penghargaan terhadap keberagaman latar belakang anak. Dalam konteks ini, sekolah bukan hanya institusi transmisi ilmu, melainkan komunitas belajar yang menghargai setiap suara dan kebutuhan peserta didik.

Humanisme juga menjadi dasar etika pendidikan yang berkeadilan dan inklusif, di mana setiap anak tanpa diskriminasi berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermakna. Prinsip ini beririsan langsung dengan visi besar Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) dan Konvensi Hak Anak, yang menuntut agar setiap penyelenggaraan pendidikan menghormati hak-hak dasar anak seperti hak untuk merasa aman, didengarkan, dan berkembang sesuai potensinya.

Manajemen strategi merupakan proses integral dalam pengelolaan organisasi yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan strategis demi mencapai tujuan jangka panjang. Namun, dalam perkembangannya, pendekatan tradisional terhadap manajemen strategi yang terlalu berorientasi pada hasil, efisiensi, dan keuntungan material sering kali mengabaikan dimensi kemanusiaan dari organisasi. Di sinilah filsafat humanis menjadi relevan sebagai fondasi etis dan filosofis dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi organisasi.

Filsafat humanis memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat, martabat, dan potensi yang perlu dikembangkan secara utuh. Dalam konteks manajemen strategi, pendekatan ini menempatkan manusia bukan sekadar sebagai sumber daya atau alat produksi, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki hak untuk berpartisipasi, berkembang, dan berkontribusi dalam arah dan tujuan organisasi. Pendekatan humanis dalam manajemen strategi tidak semata berfokus pada pencapaian target kuantitatif, tetapi lebih menekankan pada kebermaknaan, keterlibatan, dan kesejahteraan psikososial seluruh pemangku kepentingan.

Dalam proses formulasi strategi, pendekatan humanistik menekankan pentingnya partisipasi semua pihak yang terlibat dalam organisasi, mulai dari

pimpinan, staf, hingga komunitas yang dilayani. Nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan dialog menjadi prinsip dasar dalam membangun visi, misi, dan tujuan strategis. Strategi tidak dibentuk secara *top-down* semata, tetapi melalui proses reflektif dan kolaboratif yang menghargai pengalaman serta aspirasi individu.

Implementasi strategi dalam kerangka filsafat humanis dicirikan oleh kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*), pemberdayaan sumber daya manusia, dan penciptaan iklim organisasi yang mendukung pembelajaran, inovasi, serta kolaborasi. Kepala sekolah, manajer, atau pemimpin strategis diharapkan tidak hanya menjadi pengarah kebijakan, tetapi juga fasilitator pertumbuhan yang peduli terhadap kesejahteraan fisik dan emosional anggota organisasi. Dalam praktiknya, hal ini tercermin dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, komunikasi yang terbuka, serta sistem penghargaan yang adil dan menghargai kontribusi individu.

Pada tahap evaluasi strategi, pendekatan humanis menekankan pengukuran keberhasilan tidak hanya berdasarkan indikator finansial atau target produktivitas semata, melainkan juga mencakup pertumbuhan personal, kepuasan kerja, hubungan antarindividu yang harmonis, dan dampak sosial dari strategi yang dijalankan. Evaluasi dilakukan secara reflektif dan partisipatif, sehingga mendorong proses perbaikan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Penerapan filsafat humanis dalam manajemen strategi membawa banyak manfaat, seperti meningkatnya motivasi dan loyalitas anggota organisasi, munculnya inovasi sebagai hasil dari ruang ekspresi yang terbuka, serta terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan inklusif. Di sisi lain, pendekatan ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam sistem manajerial yang masih kaku atau terlalu berorientasi pada hasil instan. Namun, ketika organisasi berani mengadopsi strategi yang berakar pada nilai-nilai humanistik, maka keberlanjutan, keadilan, dan kemanusiaan dapat menjadi inti dari pencapaian strategis yang bermakna.

Dengan demikian, filsafat humanisme tidak hanya menjadi fondasi teoretis dalam pembelajaran ramah anak, tetapi juga memberikan arah moral dan praktis bagi guru, kepala sekolah, dan seluruh ekosistem pendidikan dalam merancang strategi, kurikulum, serta sistem evaluasi yang berpusat pada anak. Humanisme mengajarkan bahwa pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, dimulai dengan memanusiakan anak di dalam kelas. Selain itu, filsafat humanis tidak hanya memperkaya dimensi etis dalam manajemen strategi, tetapi juga membuka jalan menuju organisasi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial. Dalam dunia pendidikan maupun bisnis, penerapan pendekatan ini sangat relevan untuk membangun sistem yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam.

B. Landasan Sistem Nilai

1. Nilai Teologis

Nilai teologis dalam pendidikan merupakan fondasi filosofis yang mengintegrasikan dimensi spiritual, etis, dan kemanusiaan ke dalam seluruh proses pembelajaran. Pandangan ini mengasumsikan bahwa setiap manusia, termasuk anak-anak, adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan yang memiliki kehormatan, martabat, dan hak-hak dasar yang tidak dapat diabaikan.

Pendidikan tidak semata-mata bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk karakter dan menyucikan jiwa. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Attas dalam Sanusi (2017) bahwa pendidikan adalah proses “*ta’dib*”, yaitu pembentukan adab dan kesadaran akan tanggung jawab spiritual sebagai hamba Tuhan dan anggota masyarakat.

Pembelajaran ramah anak berangkat dari paradigma serupa, yakni mengedepankan perlakuan yang adil, penuh kasih sayang, dan menghormati harkat kemanusiaan anak. Dalam Islam, penghormatan terhadap anak didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Isra’ ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, Kami angkut mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas banyak makhluk yang telah Kami ciptakan."

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan mulia yang harus dijaga, termasuk dalam sistem pendidikan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip *rahmah* (kasih sayang), *'adl* (keadilan), dan *amanah* (tanggung jawab), yang menjadi inti nilai teologis dalam praktik pendidikan yang berkeadaban.

Guru sebagai pelaku utama pembelajaran memiliki peran ganda: sebagai pengajar dan sekaligus pembimbing spiritual. Rogers (1969) menyebut guru sebagai fasilitator pertumbuhan pribadi, yang dalam pendekatan teologis diperluas menjadi *murabbi* yaitu istilah untuk pendidik yang menyatu dengan nilai-nilai Ilahiyah dalam membimbing anak menuju kematangan moral dan akhlak. Guru yang berlandaskan nilai teologis akan menciptakan lingkungan kelas yang bebas dari kekerasan, penuh empati, dan membuka ruang bagi ekspresi serta partisipasi anak, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai riwayat yang menekankan pendidikan melalui keteladanan dan kelembutan (lihat: Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*). Nilai teologis tidak hanya menjadi bingkai normatif, tetapi juga menjadi roh dari seluruh proses pembelajaran ramah anak. Ia menjadikan pendidikan sebagai ruang suci untuk menciptakan generasi yang kuat secara moral dan intelektual serta berjiwa sosial tinggi.

Nilai teologis dalam manajemen strategi merujuk pada prinsip-prinsip spiritual dan keyakinan keagamaan yang menjadi dasar moral dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi organisasi. Pendekatan ini menempatkan nilai-nilai ketuhanan seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, amanah, kasih sayang, dan integritas sebagai fondasi etis yang mengarahkan keputusan strategis agar tidak hanya

berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan maslahat bagi sesama.

Dalam tahap formulasi strategi, nilai teologis mendorong pemimpin untuk merancang visi dan misi organisasi yang selaras dengan tujuan luhur, yakni memberi manfaat luas dan memuliakan nilai-nilai kehidupan. Strategi tidak hanya diukur dari kelayakan bisnis atau efisiensi administratif, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip moral dan akhlak mulia. Perencanaan strategis pun dilandasi oleh niat baik (*niyyah*), ikhtiar yang sungguh-sungguh, serta keyakinan akan takdir dan pertolongan Tuhan.

Pada tahap implementasi strategi, pemimpin diharapkan menjadi teladan (*uswah hasanah*) dalam bersikap dan bertindak, dengan menumbuhkan budaya organisasi yang berakhlak dan penuh tanggung jawab. Setiap kebijakan dilandasi oleh niat tulus untuk kebaikan, bukan manipulasi atau eksploitasi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek halal-haram, adil terhadap semua pihak, dan menghindari tindakan yang merugikan martabat manusia.

Sementara itu, evaluasi strategi yang berbasis nilai teologis menilai keberhasilan bukan semata pada capaian kuantitatif, melainkan juga dari keberkahan (*barakah*) hasil, kejujuran dalam proses, serta manfaat jangka panjang yang dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas dalam perspektif ini tidak hanya bersifat horizontal (kepada manusia), tetapi juga vertikal (pertanggungjawaban kepada Tuhan).

Dengan menerapkan nilai teologis, manajemen strategi menjadi sarana untuk membangun organisasi yang tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga bermartabat, beretika, dan berpihak pada kemaslahatan. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pendidikan, pemerintahan, dan organisasi sosial, di mana spiritualitas dan tanggung jawab moral menjadi elemen penting dalam kepemimpinan strategis yang berkelanjutan.

2. Nilai Fisik – Fisiologik

Kualitas lingkungan fisik sekolah memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pembelajaran dan kesejahteraan anak. Kepala sekolah harus memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas untuk semua siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Aspek lingkungan fisik yang perlu diperhatikan dalam menciptakan sekolah ramah anak meliputi:

- a. Kebersihan dan kesehatan sekolah, sekolah harus memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, air bersih, serta pengelolaan sampah yang baik untuk mencegah penyakit dan menciptakan suasana belajar yang sehat.
- b. Ventilasi dan Pencahayaan yang baik, ruang kelas yang cukup terang dan memiliki sirkulasi udara yang sempurna akan membantu meningkatkan fokus dan kenyamanan belajar siswa.
- c. Keamanan Infrastruktur, gedung sekolah, peralatan belajar, serta area bermain harus dirancang agar aman dan bebas dari risiko kecelakaan atau bahaya fisik lainnya.

Aspek fisiologis dalam pendidikan mengacu pada kebutuhan biologis anak, seperti nutrisi, kesehatan fisik, dan keseimbangan antara aktivitas belajar dan istirahat. Kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan fisiologis siswa antara lain: *Penyediaan Makanan Sehat*, sekolah dapat bekerja sama dengan kantin sehat untuk menyediakan makanan bergizi dan menghindari jajanan yang tidak sehat. *Program Kesehatan Sekolah*, pemeriksaan kesehatan berkala, imunisasi, serta edukasi pola hidup sehat dapat membantu menjaga kondisi fisik siswa tetap prima. *Keseimbangan Waktu Belajar dan Istirahat*, kepala sekolah memastikan bahwa jadwal pembelajaran tidak terlalu padat, memberikan siswa kesempatan untuk bergerak, beristirahat, dan berekreasi sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan mereka.

Nilai fisiologis dalam manajemen strategik merujuk pada perhatian terhadap kebutuhan dasar manusia seperti kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan fisik dalam setiap tahapan strategi

organisasi. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan strategi tidak dapat dipisahkan dari terpenuhinya kebutuhan biologis dan jasmani para pemangku kepentingan, terutama sumber daya manusia sebagai elemen inti organisasi.

Dalam tahap formulasi strategi, nilai fisiologis mendorong pemimpin untuk merancang visi, misi, dan tujuan strategis yang memperhatikan aspek kesejahteraan fisik seluruh anggota organisasi. Strategi yang dirancang tidak hanya mengejar produktivitas, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan sarana dan prasarana, lingkungan kerja yang aman, serta beban kerja yang manusiawi.

Saat implementasi strategi, perhatian terhadap nilai fisiologis tercermin dalam penyediaan fasilitas yang mendukung kesehatan dan kenyamanan kerja seperti ruang kerja yang bersih, sanitasi yang memadai, waktu istirahat yang cukup, dan akses terhadap layanan kesehatan. Pemimpin yang peduli terhadap aspek ini menunjukkan empati terhadap kondisi fisik bawahannya, sehingga menciptakan motivasi dan loyalitas kerja yang lebih tinggi.

Dalam evaluasi strategi, nilai fisiologis diukur melalui dampaknya terhadap kondisi fisik dan kesejahteraan anggota organisasi. Apakah strategi yang dilaksanakan menimbulkan beban kerja berlebihan? Apakah lingkungan kerja mendukung kesehatan fisik dan mental? Evaluasi ini menjadi penting untuk menjamin bahwa keberhasilan organisasi tidak diperoleh dengan mengorbankan kesehatan atau keselamatan individu.

Dengan demikian, integrasi nilai fisiologis dalam manajemen strategik menegaskan bahwa keberlanjutan dan efektivitas strategi hanya dapat tercapai apabila organisasi memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Strategi yang manusiawi dan berpihak pada kesejahteraan jasmani akan membentuk budaya kerja yang sehat, produktif, dan harmonis.

Dengan memperhatikan aspek fisik-fisiologik dalam perencanaan dan pengelolaan sekolah, kepala sekolah dapat memastikan bahwa setiap anak

memiliki peluang yang sama untuk belajar dalam kondisi terbaik, sejalan dengan nilai pendidikan universal.

3. Nilai Etik

Dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah anak berbasis pendidikan untuk semua, kepala sekolah mengedepankan sistem nilai etik sebagai pedoman utama dalam pengelolaan sekolah. Nilai etik mencerminkan prinsip-prinsip moral, kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab yang diterapkan dalam interaksi antara kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan semua orang yang terlibat dalam operasi sekolah.

Sekolah ramah anak bergantung pada hubungan yang kuat antara pendidik dengan siswa. Interaksi dalam proses pembelajaran menghindari praktik yang merugikan anak, seperti diskriminasi, kekerasan verbal, atau hukuman fisik. Beberapa prinsip etika yang diterapkan dalam pembelajaran di sekolah meliputi:

- a. Menghormati martabat dan hak anak.
- b. Keadilan dan non diskriminasi.
- c. Membangun komunikasi yang positif.
- d. Menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab.
- e. Tanggung jawab profesional.
- f. Kepedulian dan empati.

Dalam mewujudkan pendidikan untuk semua, kepala sekolah menerapkan prinsip inklusivitas dan keadilan, memastikan bahwa setiap siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Kepala sekolah memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak membedakan siswa berdasarkan konteks sosial, ekonomi, budaya, atau kemampuan fisik dan intelektual mereka. Setiap siswa mendapatkan perhatian yang setara, termasuk akses terhadap fasilitas sekolah yang mendukung pembelajaran mereka. Kepala sekolah berkomitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan fisik dan psikologis, dan tempat untuk membangun budaya sekolah yang penuh toleransi dan penghormatan.

Nilai etik dalam manajemen strategi merupakan prinsip moral yang menjadi landasan dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi organisasi. Etika dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi sebagai komitmen terhadap kebenaran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis.

Pada tahap formulasi strategi, nilai etik mendorong penyusunan visi, misi, dan tujuan organisasi yang tidak hanya rasional dan realistis, tetapi juga adil, jujur, dan menghormati hak serta martabat semua pihak yang terlibat. Strategi yang etis memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan kelompok rentan, sehingga menghindari praktik manipulatif atau diskriminatif.

Dalam implementasi strategi, nilai etik tercermin dalam cara kepemimpinan dijalankan. Pemimpin strategis yang beretika menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta sikap adil dalam mengelola sumber daya dan mengambil kebijakan. Etika juga menuntut pemimpin untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan perilaku tidak profesional.

Pada evaluasi strategi, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari hasil finansial atau pertumbuhan angka, tetapi juga dari proses yang dijalani: apakah keputusan diambil dengan cara yang jujur? Apakah strategi berdampak positif secara sosial dan tidak melukai kepentingan pihak lain? Evaluasi berbasis etika memastikan bahwa strategi organisasi tetap berada dalam jalur yang bermoral dan bertanggung jawab.

Integrasi nilai etik dalam manajemen strategi penting untuk membangun kepercayaan, kredibilitas, dan keberlanjutan organisasi. Etika menjadi fondasi budaya organisasi yang sehat, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang adil, transparan, dan bermartabat.

4. Nilai Estetika

Lingkungan pembelajaran yang ramah anak tidak hanya didasarkan pada aspek akademik dan sosial, namun juga oleh faktor estetika, yang mencerminkan keindahan, kerapian, serta kenyamanan dalam suasana belajar. Sistem nilai estetika dalam dunia pendidikan berperan penting dalam menciptakan suasana yang harmonis, menyenangkan, dan kondusif bagi perkembangan anak secara fisik maupun psikologis.

Keindahan lingkungan sekolah memiliki dampak langsung terhadap motivasi dan kenyamanan belajar siswa. Kepala sekolah memastikan bahwa setiap sudut sekolah dirancang dengan mempertimbangkan unsur estetika agar menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan.

Keindahan dalam lingkungan sekolah berkontribusi terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis siswa. Sekolah yang memiliki desain yang nyaman, warna yang menenangkan, serta suasana yang ramah akan membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan anak-anak dalam belajar. Menggunakan warna-warna yang menenangkan, warna dinding, dekorasi, dan interior kelas dapat dipilih berdasarkan psikologi warna yang mendukung konsentrasi dan kenyamanan siswa. Menciptakan lingkungan yang penuh inspirasi, sekolah dapat memasang kutipan-kutipan motivasi, mural edukatif, atau simbol-simbol yang memberikan dorongan positif bagi siswa. Menyediakan area relaksasi bagi siswa, ruang baca, taman kecil, atau sudut refleksi dapat menjadi tempat bagi siswa untuk beristirahat dan menenangkan diri ketika mereka merasa lelah atau tertekan.

Mendorong penghijauan sekolah, pengelolaan sampah yang baik, serta menciptakan lingkungan yang bebas dari polusi visual dan suara. Membangun budaya cinta kebersihan dan keindahan dengan melibatkan seluruh siswa dalam menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan cantik.

Nilai estetika dalam manajemen strategi berkaitan dengan penghargaan terhadap keindahan, harmoni, dan keteraturan dalam perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi strategi organisasi. Dalam konteks ini, estetika tidak hanya dimaknai sebagai unsur fisik atau visual, tetapi

juga sebagai cerminan dari keterpaduan, keseimbangan, dan keanggunan dalam tata kelola organisasi secara keseluruhan.

Pada tahap formulasi strategi, nilai estetika tercermin dalam penyusunan visi, misi, dan arah strategis yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menginspirasi dan memancarkan keindahan ide. Strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan unsur estetis cenderung lebih komunikatif, menarik, dan mudah dipahami, karena disampaikan dengan narasi yang jelas, simbol yang bermakna, dan struktur yang harmonis.

Dalam implementasi strategi, estetika tampak dalam cara organisasi menata lingkungan kerja, menyusun program, menyampaikan komunikasi, serta membangun interaksi antar individu. Ruang kerja yang bersih, rapi, dan nyaman; komunikasi yang santun dan elegan; serta sistem kerja yang tertata dengan baik merupakan wujud nyata dari strategi yang berlandaskan nilai estetika.

Sementara itu, pada tahap evaluasi strategi, nilai estetika membantu menilai sejauh mana strategi menciptakan keteraturan dan keharmonisan dalam organisasi. Apakah pelaksanaan strategi memunculkan ketidakseimbangan, kekacauan, atau justru menciptakan alur kerja yang elegan dan produktif? Estetika menjadi indikator non-material yang mendukung terciptanya atmosfer kerja yang menyenangkan dan memotivasi.

Dengan mengintegrasikan nilai estetika, manajemen strategi tidak hanya menjadi alat rasional untuk mencapai tujuan, tetapi juga menjadi proses yang bermakna secara emosional dan kultural. Strategi yang estetis akan memperkuat citra organisasi, meningkatkan kenyamanan kerja, serta membangun keterikatan emosional antara individu dengan visi bersama organisasi.

5. Nilai Logis – Rasional

Dalam menciptakan lingkungan pembelajaran ramah anak berbasis pendidikan untuk semua, kepala sekolah mengacu pada sistem nilai logis-rasional, yaitu pendekatan yang didasarkan pada pemikiran yang objektif,

sistematis, dan berbasis bukti dalam pengelolaan sekolah. Nilai logis-rasional menekankan bahwa setiap kebijakan dan strategi yang diterapkan memiliki dasar yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata dalam dunia pendidikan. Pendekatan ini menjadi sangat penting dalam menghadapi masalah pendidikan kontemporer yang semakin rumit, di mana kepala sekolah membuat keputusan yang tidak hanya berlandaskan idealisme, tetapi juga berdasarkan data, fakta, dan analisis yang logis.

Dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang ramah anak dan inklusif, kepala sekolah menggunakan pendekatan *evidence-based decision making*, yaitu mengambil keputusan berdasarkan bukti empiris, data statistik, dan hasil penelitian. Melakukan evaluasi kondisi sekolah, termasuk sarana prasarana, kompetensi guru, serta kebutuhan siswa, sebelum merancang kebijakan. Memanfaatkan hasil asesmen siswa, survei kepuasan anak, serta laporan perilaku untuk memahami faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Melakukan monitoring dan refleksi terhadap kebijakan yang telah diterapkan untuk memastikan kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif dalam membuat sekolah menjadi tempat yang ramah anak.

Nilai logis-rasional dalam manajemen strategi menekankan pentingnya pendekatan berbasis akal sehat, penalaran sistematis, dan pertimbangan objektif dalam seluruh proses strategis organisasi. Nilai ini menjadi fondasi utama bagi pengambilan keputusan yang tepat, efisien, dan terukur, serta mencegah strategi yang bersifat impulsif, spekulatif, atau emosional semata.

Dalam tahap formulasi strategi, nilai logis-rasional menuntut penyusunan visi, misi, dan tujuan organisasi berdasarkan analisis yang mendalam terhadap data, kondisi lingkungan internal dan eksternal, serta tren masa depan. Strategi dirancang melalui proses berpikir kritis, penyusunan skenario, dan penggunaan alat-alat analisis strategis seperti SWOT, PESTEL, atau *Five Forces*.

Pada tahap implementasi strategi, logika dan rasionalitas mengarahkan organisasi untuk memilih metode, sumber daya, dan jalur pelaksanaan yang paling efektif dan efisien. Keputusan-keputusan operasional dibuat berdasarkan pertimbangan rasional yang mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun panjang, biaya-manfaat, serta risiko yang dapat ditoleransi.

Dalam evaluasi strategi, nilai logis-rasional terlihat dalam proses pengukuran kinerja berbasis indikator yang objektif dan terukur (KPI), serta dalam penggunaan data untuk merefleksi dan memperbaiki strategi. Evaluasi dilakukan secara sistematis dengan tujuan menghasilkan umpan balik yang obyektif untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan menjadikan logika dan rasionalitas sebagai landasan, manajemen strategi mampu menghasilkan keputusan yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai ini memastikan bahwa setiap langkah strategis dilandasi oleh argumentasi yang kuat, bukan asumsi semata, sehingga meningkatkan kepercayaan, efisiensi, dan daya saing organisasi.

6. Nilai Teleologik

Dalam menciptakan lingkungan pembelajaran ramah anak berbasis pendidikan untuk semua, kepala sekolah perlu memiliki visi yang jelas terhadap tujuan akhir dari setiap kebijakan dan strategi yang diterapkan. Pendekatan ini dikenal sebagai nilai teleologis, yaitu sistem nilai yang berfokus pada hasil atau dampak jangka panjang dari suatu tindakan. Dalam konteks pendidikan, nilai teleologis menekankan bahwa setiap kebijakan dan program sekolah diarahkan pada pencapaian kesejahteraan, perkembangan holistik siswa, serta peningkatan kualitas Pendidikan yang berkeadilan bagi semua anak.

Nilai teleologis dalam manajemen strategi berpijak pada prinsip bahwa setiap tindakan strategis harus diarahkan pada tujuan akhir (*telos*) yang bernilai dan bermakna. Pendekatan ini menekankan bahwa strategi tidak hanya dinilai dari prosesnya, tetapi terutama dari hasil dan dampak

jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi. Dengan kata lain, nilai suatu strategi ditentukan oleh sejauh mana strategi tersebut membawa kebaikan, kebermanfaatan, dan kontribusi nyata terhadap tujuan luhur organisasi dan masyarakat.

Dalam tahap formulasi strategi, nilai teleologis mendorong organisasi untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan strategis yang tidak hanya realistis dan terukur, tetapi juga bermuatan nilai-nilai luhur—seperti kesejahteraan bersama, keadilan sosial, keberlanjutan, dan pemberdayaan manusia. Strategi yang dirancang harus memiliki arah jelas dan bermuara pada dampak positif yang lebih besar dari sekadar keuntungan ekonomi atau pencapaian jangka pendek.

Pada tahap implementasi strategi, nilai teleologis mengarahkan setiap aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan tujuan akhir yang telah ditetapkan. Setiap kebijakan dan langkah operasional harus ditinjau dari kontribusinya terhadap pencapaian misi jangka panjang, serta dampaknya terhadap pemangku kepentingan, lingkungan, dan generasi mendatang. Hal ini menciptakan kesadaran bahwa strategi bukan hanya tentang "apa yang dilakukan", tetapi "untuk apa dan siapa" strategi itu dijalankan.

Dalam evaluasi strategi, pendekatan teleologis menilai keberhasilan tidak hanya dari pencapaian target numerik, tetapi dari nilai manfaat yang dihasilkan. Apakah strategi tersebut membawa perubahan berarti? Apakah strategi mendorong tercapainya visi bersama? Evaluasi dalam kerangka ini mendorong refleksi mendalam tentang makna dan arah strategis organisasi secara keseluruhan.

Dengan mengintegrasikan nilai teleologis, manajemen strategi menjadi lebih bernilai secara filosofis dan etis. Strategi tidak lagi sekadar instrumen teknokratis, tetapi menjadi jalan menuju pencapaian tujuan luhur yang bermakna bagi manusia, organisasi, dan masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan dalam sektor pendidikan, sosial, dan publik, di mana tujuan akhir sering kali berkaitan erat dengan pembangunan manusia dan keadilan sosial.

C. Landasan Teori dan Konsep

1. Manajemen Strategis

a. Pengertian dan Hakikat Manajemen Strategi

Manajemen strategis mencakup serangkaian aktivitas yang dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan program, hingga evaluasi terhadap program tersebut, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang (Akdon, 2016; Fattah, 2013). Dalam konteks pendidikan, manajemen strategi dapat diterapkan pada tingkat satuan pendidikan, mengingat pendidikan terdiri dari sekelompok individu yang terstruktur dalam kegiatan yang terorganisir dan memiliki tujuan yang jelas berdasarkan visi dan misi pendidikan. Pendidikan juga menetapkan sasaran kerja untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Manajemen strategi adalah pendekatan pengelolaan organisasi yang mengintegrasikan proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dengan orientasi utama pada pencapaian tujuan jangka panjang. Wheelen dan Hunger (2003) dalam kutipan Neneng (2020) menyatakan bahwa manajemen strategi mencakup berbagai keputusan serta tindakan manajerial yang bertujuan menetapkan arah dan kinerja organisasi dalam jangka panjang (Nurmalasari, N & Masitoh, 2020).

Fred R. David (2010) dalam kutipan Arifin (2022) menjelaskan bahwa manajemen strategis merupakan perpaduan antara seni dan ilmu dalam menyusun, melaksanakan, dan menilai keputusan-keputusan yang melibatkan berbagai fungsi organisasi, guna memastikan tercapainya tujuan organisasi tersebut (Arifin & Kartiko, 2022).

Secara prinsip, proses pengembangan manajemen strategis diawali dengan penetapan visi dan misi organisasi. Dengan adanya visi dan misi tersebut, para pengambil keputusan memperoleh gambaran yang jelas tentang tujuan yang ingin diraih. Selanjutnya,

organisasi menyusun profilnya dengan memperhitungkan aspek operasional, target pasar, kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan tantangan eksternal yang mungkin dihadapi.

Manajemen strategis merupakan konsep kunci dalam pengelolaan organisasi yang berorientasi pada pencapaian sasaran jangka panjang. Proses ini mencakup tahapan yang rumit mulai dari perencanaan hingga implementasi, dengan tujuan mengarahkan organisasi menuju visi yang telah ditetapkan. Berbagai perspektif dari para pakar dalam bidang ini turut memperkaya pemahaman tentang makna serta prinsip-prinsip dasar manajemen strategis.

Manajemen strategis adalah kumpulan keputusan dan langkah-langkah manajerial yang berperan dalam menentukan pencapaian kinerja organisasi dalam jangka panjang. Proses ini mencakup analisis terhadap lingkungan internal maupun eksternal, perumusan strategi, pelaksanaan strategi, serta proses evaluasi dan pengendaliannya. Sebagai pendekatan yang sistematis, manajemen strategis memberikan panduan arah serta batasan operasional bagi organisasi dalam upaya mewujudkan tujuannya.

Inti dari manajemen strategi adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara paling efektif untuk memenuhi tujuan strategi.

Berbagai ahli merumuskan manajemen strategi dengan penekanan yang berbeda. Robbins dan Coulter (2012 : 225) mendefinisikan manajemen strategi sebagai :

“ what managers do to develop the organization’s strategies. It involves decision making and actions that determine the long-run performance of an organization.”

Konsep ini menekankan bahwa manajemen strategi tidak sekedar aktivitas perencanaan, melainkan juga mencakup pengambilan keputusan dan langkah-langkah nyata yang mempengaruhi

performansi organisasi secara jangka panjang. Robbins memandang strategi sebagai bagian integral dari kepemimpinan yang bertumpu pada analisis lingkungan, penentuan arah organisasi, serta menyelaraskan antara sumber daya dengan tujuan strategis.

Definisi ini memperluas pengertian manajemen strategi ke dalam suatu proses yang melibatkan analisis kondisi eksternal dan internal (*enviromental scanning*), perumusan strategi (*formulation*), implementasi strategi (*implementation*), serta evaluasi dan pengendalian (*evaluation and control*). model ini memberikan kerangka sistematis bagi manajemen dalam menetapkan prioritas dan merespons dinamika lingkungan.

Hakikat manajemen strategi terletak pada peranannya sebagai alat untuk menavigasi organisasi dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis. Manajemen strategi berfungsi sebagai kompas dalam mengarahkan keputusan-keputusan penting, mengantisipasi perubahan, serta menjaga konsistensi antara visi organisasi dengan realitas operasional. Menurut David (2011:43), hakikat strategi manajemen terdiri dari tiga tahap utama :

- 1) Perencanaan strategi (*strategy formulation*) : mengabungkan identifikasi misi, analisis eksternal dan internal, serta pemilihan strategi yang tepat.
- 2) Pelaksanaan strategi (*strategy implementation*): bagaimana strategi diterapkan melalui kebijakan, struktur organisasi, dan distribusi sumber daya.
- 3) Evaluasi strategi (*strategy evaluation*): penilaian ulang efektivitas strategi dan penyesuaian bila diperlukan.

Manajemen strategi juga bersifat integratif dan berorientasi ke masa depan. Artinya strategi harus melibatkan seluruh elemen serta mempertimbangkan kecenderungan dan tantangan masa depan agar oragnisasi tetap reevan dan kompetitif.

Persaingan yang memunculkan daya saing, erat kaitannya dengan pemahaman mekanisme pasar (standar dan *benchmarking*), kecepatan menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, peningkatan daya saing organisasi bersifat unik, tetapi pada intinya dipengaruhi oleh aspek kreativitas, kapasitas, teknologi yang digunakan, dan jangkauan pemasaran yang dicapai. Esensi manajemen strategi dalam pengembangan daya saing organisasi, baik bersifat nirlaba maupun berorientasi laba dapat dijabarkan atas hal pokok berikut:

- 1) Pertumbuhan dan berkelanjutan; hal ini dicirikan oleh adanya kegiatan lebih besar dari organisasi yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan SDM
- 2) Berfikir strategis; hal ini dicirikan oleh pemahaman tentang pentingnya faktor waktu, proses kontinu dan iteratif dalam mengidentifikasi kegiatan yang menjanjikan ke depan yang berbasis pada pemetaan kemampuan yang dimiliki secara komprehensif memperhatikan faktor-faktor makro, disamping pembelajaran organisasi dalam menuju daya saing secara parsial ataupun utuh.
- 3) Manajemen strategis; dalam implementasinya ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, pemantauan dan evaluasi strategi.

Dalam proses manajemen strategi diperlukan pernyataan-pernyataan yang terkait dengan penetapan visi, misi dan tujuan sebagai jawaban terhadap pencanangan strategi yang telah disusun menurut tingkatannya (korporat, bisnis, dan fungsional) yang didasarkan pada muatan, konsistensi dan keterpaduannya dari suatu kerangka kerja proses pengambilan keputusan organisasi untuk jangka panjang.

b. Strategi

Secara etimologis, kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani *strategos*, yang berarti seni seorang jenderal dalam memenangkan peperangan. Dalam konteks organisasi modern, strategi merujuk pada

serangkaian rencana dan tindakan yang bersifat jangka panjang, disusun untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi lingkungan yang dihadapi.

Menurut Wheelen dan Hunger (2012), strategi adalah rencana terpadu dan menyeluruh yang mengaitkan keunggulan kompetitif internal organisasi dengan peluang eksternal lingkungan untuk mencapai misi organisasi. Strategi bertindak sebagai arah dan kerangka keputusan manajerial yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Strategi adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi (termasuk pendidikan), strategi mencerminkan arah dan cara yang dipilih organisasi untuk meraih keunggulan dan menyelesaikan tantangan lingkungan.

Dalam konteks pendidikan, strategi mencerminkan pilihan sadar kepala sekolah dalam menghadapi tantangan, mengelola sumber daya, dan mengarahkan seluruh elemen sekolah untuk mencapai visi pendidikan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Strategi dalam dunia pendidikan tidak sekadar merupakan rencana taktis, tetapi merupakan arah dan kerangka tindakan jangka panjang yang dirancang untuk membawa perubahan bermakna dalam proses pembelajaran, manajemen sekolah, serta hubungan antarwarga sekolah.

Berdasarkan analisis lingkungan, sekolah mengembangkan alternatif strategi yang dapat diambil. *Wheelen* dan *Hunger* membagi strategi ke dalam tiga tingkatan:

- 1) Strategi tingkat korporat (*Corporate Strategy*). Berfokus pada ruang lingkup kegiatan sekolah, termasuk diversifikasi, integrasi vertikal, atau fokus pada kegiatan pokok sekolah.
- 2) Strategi tingkat bisnis (*Business Strategy*). Berfokus pada cara bersaing dalam industri tertentu. Contohnya termasuk strategi

diferensiasi, kepemimpinan biaya, atau fokus pada segmen pasar tertentu.

- 3) Strategi tingkat fungsional (*Functional Strategy*). Berfokus pada optimalisasi fungsi-fungsi sekolah, seperti promosi sekolah, operasional sekolah, keuangan, dan sumber daya manusia.

Strategi korporasi adalah yang menspesifikasikan apa yang akan dimasuki atau yang ingin dimasuki dan apa yang ingin dikerjakan oleh perusahaan dengan bisnis tersebut. ini didasarkan pada misi dan tujuan organisasi serta peranan yang akan dimainkan setiap unit organisasi. bagian lain dari strategi korporasi adalah manajemen puncak memutuskan apa yang akan dilakukan dengan bisnis-bisnis tersebut. strategi korporat menyangkut keputusan-keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen puncak dan menghasilkan tindakan-tindakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan tujuan unit bisnis. terdapat tiga strategi utama dalam strategi tingkat corporate

- 1) strategi pertumbuhan garis baru dengan strategi pertumbuhan sebuah organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini maupun bisnis melalui bisnis yang baru.
- 2) strategi stabilitas merupakan strategi dalam mengatasi kemerosotan penghasilan yang sedang dihadapi oleh perusahaan. organisasi tetap melakukan apa yang sedang dilakukan saat ini.
- 3) strategi pembaharuan ketika sebuah organisasi sedang menghadapi kesulitan sesuatu perlu dilakukan. manajer harus mengembangkan strategi yaitu disebut strategi pembaharuan untuk mengatasi kinerja yang menurun.

Strategi di tingkat bisnis adalah strategi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kemampuan kompetensi dari perusahaan dibandingkan para pesaingnya pada bisnis yang sama. Morison (2016)

membahas bahwa ada 5 faktor pendorong kompetensi dari Michael Porter atau dikenal sebagai 5 *Forces Factor* model :

- 1) pelanggan. ialah faktor utama mengapa sebuah bisnis dijalankan.
- 2) persaingan dalam bisnis yang sama
- 3) potensi pendatang baru
- 4) pemasok faktor input
- 5) perusahaan substitusi

Terdapat strategi dalam tingkat unit bisnis:

- 1) strategi pemosisian atau *positioning strategy* dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan Dengan cara bagaimana perusahaan dapat memperoleh perhatian dari pelanggan atau memenangkan persaingan
- 2) strategi penyesuaian atau adaptif strategi dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk memilih strategi yang paling sesuai ketika perusahaan berhadapan dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis yang sedang di jalankan

Setelah alternatif strategi dikembangkan, langkah selanjutnya adalah memilih strategi yang paling sesuai dengan tujuan sekolah dan kondisi lingkungan. Pemilihan strategi melibatkan evaluasi terhadap beberapa faktor, seperti:

- 1) Kesesuaian. Sejauh mana strategi tersebut sesuai dengan tujuan dan misi sekolah
- 2) Kelayakan : Kemampuan sekolah untuk melaksanakan strategi tersebut berdasarkan sumber daya yang dimiliki.
- 3) Keberterimaan : Tingkat penerimaan strategi oleh *stakeholders*, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen sekolah, dan pemerintah/pemilik yayasan sekolah.

Menurut Sondang P Siagian dalam bukunya manajemen strategik (2016) proses manajemen strategik terdiri dari berbagai tahap diantaranya ada 12 tahap yang dilalui dalam proses manajemen strategic yaitu:

- 1) perumusan misi organisasi atau perusahaan
- 2) penentuan profil organisasi
- 3) analisis dan pilihan strategis
- 4) penetapan sasaran jangka panjang
- 5) penentuan strategic induk
- 6) penentuan strategic operasional
- 7) penentuan sasaran jangka pendek
- 8) perumusan kebijaksanaan
- 9) pelebagaan strategi
- 10) penciptaan sistem pengawasan
- 11) penciptaan sistem penilaian
- 12) penciptaan sistem umpan balik

c. Komponen dan Tahapan Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan proses berkelanjutan yang mencakup beberapa komponen utama yang berhubungan satu sama lain dan membentuk satu keatuan sistematis dalam upaya untuk mencapai tujuannya sebagai organisasi. Menurut Wheelen dan Hunger (2015: 48), manajemen strategi terdiri dari empat tahapan utama yaitu :

1) Pemindaian lingkungan (*Envirometal Scanning*).

Tahap pertama dalam manajemen strategi adalah melakukan pemindaian lingkungan organisasi secara internal dan eksternal. Pemindaian ini meliputi analisis terhadap kondisi internal dan eksternal sekolah guna mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT). Robbins dan Coulter (2012; 146) menyatakan bahwa “*environmental scanning involves monitoring, evaluating, and disseminating information from the external and internal environments to key people within the organization*”. *Environmental scanning* adalah tindakan teratur yang dilakukan oleh organisasi untuk memahami kondisi dan perubahan yang terjadi baik di dalam (internal)

maupun di luar (eksternal) organisasi. Tujuannya adalah untuk menemukan peluang dan ancaman dari sumber luar, serta kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, yang nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis.

Unsur – unsur pemindaian lingkungan menurut Robbin dan Coulter adalah:

a) *Monitoring*

Hal ini merujuk pada kegiatan mengamati secara terus-menerus tren, kejadian, dan perubahan baik di lingkungan internal (misalnya: sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya kerja) maupun eksternal (misalnya: kebijakan pemerintah, kondisi pasar, perkembangan teknologi).

b) *Evaluating*

Tahap ini berarti melakukan analisis dan penilaian terhadap informasi yang diperoleh. Apakah faktor-faktor tersebut menjadi ancaman atau peluang (untuk faktor eksternal) dan kekuatan atau kelemahan (untuk faktor internal)?

c) *Disseminating Information*

Setelah informasi dianalisis, hasilnya perlu disampaikan kepada pihak-pihak kunci dalam organisasi—misalnya pimpinan, manajer, atau tim pengambil keputusan—agar bisa digunakan dalam proses perencanaan strategi.

Environmental scanning berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi organisasi agar:

- a) Dapat mengantisipasi perubahan lingkungan
- b) Menyesuaikan strategi agar tetap relevan dan kompetitif
- c) Meningkatkan respon organisasi terhadap peluang dan ancaman

Dalam konteks sekolah atau institusi pendidikan:

- a) Monitoring eksternal: memperhatikan kebijakan pendidikan nasional, tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi pembelajaran.
- b) Monitoring internal: mengevaluasi kualitas guru, sarana prasarana, budaya sekolah, dan sistem manajemen.
- c) Hasil evaluasi disampaikan kepada kepala sekolah dan tim manajemen untuk menentukan strategi pengembangan sekolah, seperti peningkatan mutu pembelajaran atau penguatan program sekolah ramah anak.

Pemindaian ini dilakukan oleh kepala sekolah menganalisis lingkungan baik dari sisi internal maupun eksternal sekolah. Bila merujuk kepada Wheelen & Hunger maka Analisis Lingkungan Internal (ALI) terdiri dari kekuatan dan kelemahan dilihat dari faktor :

- a) struktur Organisasi ; system komando, garis pelaporan, departementalisasi
- b) budaya Organisasi ; nilai, norma, kepercayaan Bersama yang mempengaruhi perilaku, kepemimpinan, gaya manajerial, etos kerja, komitmen terhadap visi dan misi
- c) sumber Daya Manusia (SDM) ; kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, produktivitas, loyalitas, moral kerja, system pelatihan dan pengembangan
- d) Sumber Daya Fisik; Fasilitas, teknologi, infrastruktur, kondisi bangunan, laboratorium, teknologi informasi
- e) Keuangan; kekuatan modal dan arus kas, sumber pendanaan, efisiensi penggunaan anggaran, analisis rasio keuangan
- f) Pemasaran; citra Lembaga di mata public, strategi komunikasi dan publikasi.

Jika digunakan dalam konteks sekolah, maka analisis internal dapat mencakup;

- a) Kompetensi guru dan tenaga kependidikan

- b) Ketersediaan sarana dan prasarana
- c) Struktur manajemen sekolah
- d) Keterlibatan stakeholder internal
- e) Budaya sekolah yang inklusif.

Tujuan Analisis Internal mengidentifikasi Kekuatan dan kelemahan sebagai bagian dari analisis SWOT, menjadi dasar dalam merumuskan strategi berdasarkan kapabilitas actual organisasi.

Sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) terdiri dari Peluang dan Ancaman dilihat dari faktor:

- a) Ekonomi; stabilitas ekonomi nasional dan global. Sumber pendanaan dan insentif pemerintah
- b) Politik dan hukum; regulasi pemerintah dan kebijakan pemerintah, Undang-Undang perlindungan anak, hal asasi dan Pendidikan
- c) Social Budaya; nilai dan norma Masyarakat, kesadaran tentang Pendidikan, perubahan gaya hidup, preferensi orang tua
- d) Teknologi; perkembangan teknologi digital di dunia Pendidikan, TIK, inovasi dalam media pembelajaran
- e) Lingkungan Alam; perubahan iklim, bencana alam, isu-isu lingkungan yang berdampak kepada kegiatan Pendidikan.
- f) Pesaing atau competitor; sekolah-sekolah lain dengan layanan serupa, Lembaga Pendidikan alternatif
- g) Konsumen atau pengguna layanan; orang tua, siswa dan Masyarakat sekitar, harapan terhadap layanan Pendidikan
- h) Pemasok ; teknologi Pendidikan, pelatihan guru
- i) Pengganti ; Pendidikan informal
- j) Pendatang baru ; munculnya Lembaga Pendidikan baru

Untuk Pendidikan, lebih spesifik pada factor eksternal langsung yang berinteraksi rutin dengan organisasi, seperti; Dinas

Pendidikan, Komite Sekolah, Lembaga Pengawas Akreditasi, LSM atau Mitra industry, Media Lokal. Mengidentifikasi Peluang dan Ancaman dalam Analisis SWOT menjadi dasar penyesuaian strategi organisasi agar adaptif terhadap perubahan lingkungan. Melakukan analisis terhadap kondisi eksternal seperti kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, isu sosial dan perkembangan kebutuhan anak. Sebagai contoh: kepala sekolah melihat adanya keterbatasan sarana bermain sebagai titik kelemahan sekolah, dukungan dinas pendidikan sebagai peluang bagi pengembangan sekolah, atau maraknya budaya kekerasan verbal di masyarakat sebagai ancaman bagi perkembangan karakter anak atau siswa.

2) Formulasi Strategi (*Strategy Formulation*).

Tahap kedua dalam manajemen strategi adalah formulasi strategi. Menurut Wheelen & Hunger pada tahap Formulasi terdiri dari :

a) Menentukan Visi dan Misi Sekolah

Visi sekolah dirumuskan sebagai arah jangka Panjang yang ingin dicapai. Misi menjabarkan cara untuk mencapai visi. Dalam konteks Pendidikan maka visi dan misi akan dimuat dalam Renstra, RKS atau Profil sekolah. Sekolah merumuskan tujuan Pendidikan jangka menengah dan Panjang, contohnya; meningkatkan hasil belajar siswa dalam 3 tahun ke depan sebesar 20%, menyediakan ruang pembelajaran yang ramah anak di seluruh kelas dalam dua tahun.

b) Menentukan Tujuan Strategis

Tujuan harus SMART dan mendukung pencapaian misi. Dalam konteks Pendidikan tujuan akan dimuat dalam Rencana Strategi sekolah dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berdasarkan hasil analisis SWOT (baik melalui

RKS maupun musyawarah Bersama komite sekolah/guru/orangutan), sekolah merancang strategi berbagai level; strategi Tingkat sekolah.

c) Merumuskan Strategi

Strategi Tingkat fungsi seperti pelatihan guru, pembaruan modul ajar, penerapan kegiatan literasi karakter, renovasi ruang belajar ramah anak Dalam tahap ini, strategi harus spesifik, realistis dan selaras dengan kapasitas lembaga. Strategi pada tahap ini meliputi :

- (1) Penetapan tujuan strategis, misalnya menciptakan sekolah ramah anak dengan membentuk Tim Gugus Ramah Anak
- (2) Penentuan prioritas program, misalnya pelatihan guru tentang perlindungan anak, penyusunan SOP anti kekerasan dan SOP perlindungan anak.
- (3) Pemilihan pendekatan manajerial kolaboratif atau partisipatif, misalnya mengintegrasikan nilai inklusif dalam pembelajaran.

3) Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

Tahap implementasi merupakan momen kritis dalam manajemen strategi karena keberhasilan sangat ditentukan oleh bagaimana strategi dijalankan dalam praktik. Wheelen & Hunger menjelaskan tahap implementasi strategi terdiri dari tiga komponen utama yaitu:

a) Program (*programs*)

Program adalah serangkaian kegiatan atau proyek operasional yang disusun untuk mengimplementasikan strategi yang telah diformulasikan. Program menjabarkan strategi menjadi Langkah konkret dan terukur. *Wheelen* dan *Hunger* menekankan bahwa program harus :

- (1) Memiliki tujuan yang jelas

- (2) Berorientasi pada hasil
- (3) Memiliki timeline spesifik
- (4) Dapat diukur keberhasilannya

b) Anggaran (*Budget*)

Anggaran adalah rencana alokasi sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Anggaran memastikan bahwa strategi dapat dijalankan secara realistis dan berkelanjutan. Alokasi anggaran disesuaikan dengan prioritas program dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Anggaran berfungsi sebagai:

- (1) Alat perencanaan detail
- (2) Instrumen pengendalian
- (3) Sarana komunikasi rencana keuangan
- (4) Dasar evaluasi kinerja

c) Prosedur (*procedures*)

Prosedur adalah rangkaian Langkah-langkah teknis dan administrative yang menagtur bagaimana program dan kegiatan dilaksanakan. Prosedur menjamin konsistensi, akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan strategi. Merupakan pedoman bagi pelaksana agar tidak terjadi penyimpangan. Prosedur sering disebut *Standard Operating Procedures* (SOP) yang :

- (1) Merinci berbagai aktivitas yang harus dilakukan.
- (2) Menetapkan urutan aktivitas.
- (3) Menjelaskan cara pelaksanaan aktivitas.
- (4) Menentukan waktu pelaksanaan.

4) Evaluasi dan Pengendalian Strategi (*Strategy Evaluastion and Control*).

Evaluasi dan Pengendalian merupakan tahap terakhir dalam proses manajemen strategi yang dikemukakan oleh *Wheelen* dan *Hunger*. Tahap ini merupakan proses pemantauan aktivitas dan

hasil kinerja perusahaan sehingga kinerja aktual dapat dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan.

Komponen utama evaluasi dan pengendalian :

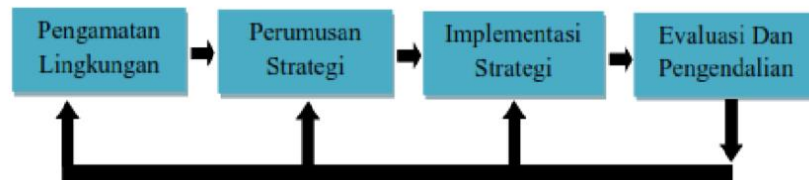
- a) Penentuan Standar
- b) Pengukuran Kinerja
- c) Analisis Penyimpangan
- d) Proses Evaluasi Dan Pengendalian
- e) Pengumpulan Informasi
- f) Data Kinerja Operasional
- g) Laporan Keuangan
- h) Umpan Balik Pelanggan
- i) Informasi Pasar

Wheelen dan *Hunger* menekankan bahwa evaluasi dan pengendalian harus bersifat *forward-looking* dan tidak hanya fokus pada identifikasi masalah, tetapi juga pada pencegahan dan antisipasi tantangan dimasa depan. Sistem evaluasi yang efektif memungkinkan sekolah untuk belajar dari pengalaman dan terus meningkatkan kinerjanya.

Evaluasi dilakukan melalui monitoring perubahan perilaku guru dan siswa, serta melalui instrumen penilaian seperti kuisisioner kepuasan anak, laporan kasus, dan *feedback* dari orang tua. Mekanisme kontrol ini penting untuk memastikan strategi terus relevan dan efektif. Penerapan tahapan manajemen strategi di sekolah bukan hanya merupakan tugas administratif, melainkan bagian integral dari penciptaan lingkungan belajar yang holistik, adaptif dan menghormati anak. Kepala sekolah sebagai pemimpin strategis dituntut untuk memahami konteks sekolah sebagai sistem sosial yang kompleks, dan menjadikan strategi sebagai alat untuk:

- a) Meningkatkan mutu pembelajaran.
- b) Membangun budaya sekolah yang positif.

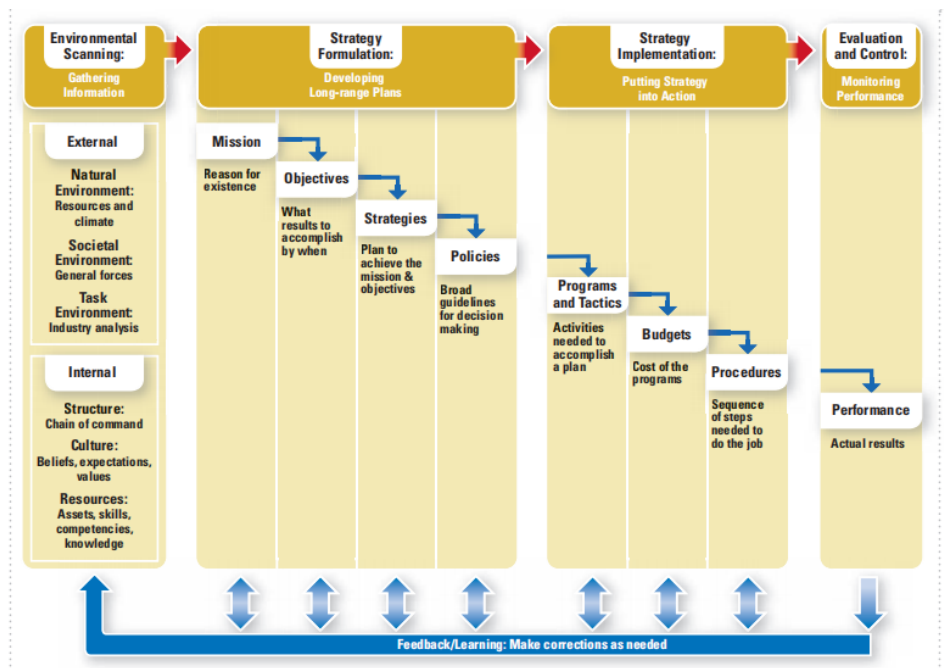
- c) Melindungi dan memberdayakan anak didik secara optimal.
Hal ini dapat tergambarkan pada diagram berikut:



Gambar 2.1

Elemen-elemen Dasar dari proses Manajemen Strategis

Rentetan proses manajemen strategis mulai dari kegiatan observasi tentang lingkungan, perencanaan strategis, implementasi strategis, serta evaluasi dan pengendalian, pada lingkungan sekolah tidak lepas dari kemampuan kepala sekolah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada yang dimiliki oleh sekolah agar terintegrasi dengan fungsi yang berkaitan dengan manajemen lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Elemen-elemen seperti disebut diatas tergambarkan pada model manajemen strategis seperti tampak pada gambar berikut:



Gambar 2.2

Model Manajemen Strategis, Hunger & Wheelen (2015:48)

Proses manajemen strategis mencakup mulai dari analisis lingkungan hingga hasil evaluasi; analisis manajemen baik faktor di dalam maupun stakeholder yang berada di luar dengan intensitas yang dekat, sedang, atau jauh; dan kemudian, analisis lingkungan eksternal untuk peluang dan ancaman, serta analisis lingkungan internal untuk kekuatan dan kelemahan. Bagaimana pimpinan sekolah dapat menggunakan strategi yang tepat untuk mendorong sumber daya manusia dan alam untuk mengatasi lingkungan eksternal.

Mc.Kinsey dalam Ravanfar (2015) menyebutkan bahwa keberhasilan suatu strategi terpaut erat dengan faktor-faktor lainnya yang menjadi sarat apakah suatu strategi bisa berjalan baik. Mc. Kinsey dikenal luas melalui kontribusi model 7S Framework yang merupakan salah satu kerangka berpikir strategis paling berpengaruh dalam dunia manajemen. Model ini menyatakan bahwa keberhasilan strategi organisasi tidak hanya bergantung pada satu aspek (misalnya struktur), tetapi pada

keselarasan antara tujuh elemen internal organisasi yang saing terkait:

Tabel 2.1 Mckinsey 7S Frame work

No	Elemen	Penjelasan
1	Strategy	Rencana aksi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan tujuan organisasi.
2	Structure	Cara Organisasi dibentuk secara hirarkis atau fungsional
3	Systems	Proses dan prosedur sehari-hari yang mendukung operasional
4	Shared Value	Nilai inti yang menjadi fondasi budaya organisasi
5	Style	Gaya Kepemimpinan dan pola interaksi manajerial
6	Staff	Sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan dan pengembangan
7	Skills	Kompetensi dan Kemampuan utama organisasi maupun individu

Mckinsey 7S digunakan dalam berbagai konteks strategi, seperti; analisis kesesuaian strategi dan struktur organisasi, perubahan organisasi, diagnosa masalah organisasi, aligning implementasi strategi dengan budaya organisasi. Dalam implementasi di sekolah atau lembaga pendidikan terkait strategi pembelajaran ramah anak maka dalam *Strategy* dapat dengan cara menerapkan strategi ramah anak, *structure* dilakukan dalam bentuk penyesuaian struktur manajemen sekolah agar lebih kolaboratif, *systems* dilakukan dengan menyusun SOP perlindungan anak, sistem pengaduan kekerasan, *shared values* dengan cara menjunjung inklusivitas, kasih sayang dan keadilan, *style* terlihat pada kepemimpinan partisipatif dari kepala sekolah, *staff* di siapkan dengan cara guru dilatih dalam pendekatan psikologi anak, dan *skills* mempersiapkan kemampuan guru dalam komunikasi empatik dan pembelajaran diferensiatif. Sistem atau mekanisme dan prosedural yang telah biasa

berjalan dalam lembaga terkait juga akan sangat menunjang, yang terakhir semua implementasi strategitakan bisa terlepas dari budaya organisasi.

2. Sekolah Ramah Anak

a. Pengertian Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan anak sebagai subjek utama dalam lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. SRA tidak hanya menjamin hak-hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga memberikan perlindungan, rasa aman serta kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Seperti yang dinyatakan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2020), “Sekolah Ramah Anak adalah institusi pendidikan yang menjamin, memenuhi dan menghormati hak-hak anak serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya”. Dalam peerspektif global, UNICEF (2012) memperkenalkan konsep *Child-Friendly Schools* sebagai sekolah yang “*child seeking and child centred*”. artinya sekolah harus aktif mencari dan menarik anak untuk bersekolah dan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pusat kebijakan dan praktik pendidikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjadikan anak bukan sekadar penerima layanan pendidikan, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam proses belajar mengajar dan pengambilan keputusan sekolah.

SRA adalah institusi pendidikan formal, nonformal dan informal yang memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan, pemenuhan, penghormatan dan keamanan terhadap hak-hak anak dalam seluruh aspek pendidikan. Konsep ini menekankan terciptanya tempat yang aman, bersih, sehat, peduli, berbudaya dan ideal untuk pertumbuhan

anak. SRA tidak berarti membangun sekolah baru sebaliknya, itu berarti membuat sekolah nyaman bagi anak-anak, karena sekolah adalah rumah kedua bagi para siswa, setelah rumah mereka sendiri (Supeni, 2018 : 78). Hal ini mengingat karena anak berada di sekolah kurang lebih delapan jam dalam sehari berada dilingkungan sekolah, sehingga perlu adanya jaminan terhadap perlindungan anak dari berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, staf sekolah, penjaga sekolah dan orang lain. Untuk mendukungnya bahkan sangat perlu untuk bekerja sama dengan orang tua, masyarakat, alumni, dunia usaha. Bronfenbrenner dalam teorinya tentang ekologi perkembangan anak yang di bahas oleh Saul Mcleod (2025) menyatakan bahwa *“development is influenced by the different types of environmental systems in which a child is embedded, including the micro system, such as school and family”*. Perkembangan anak tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi sangat dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan tempat anak hidup dan berinteraksi. Kalimat ini menekankan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai sistem sosial yang saling terkait, terutama sistem yang paling dekat, yaitu mikrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan terdekat dan paling langsung yang berinteraksi dengan anak setiap hari, mencakup keluarga, sekolah, teman sebaya, lingkungan bermain. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar kasih sayang, nilai, dan identitas. Sekolah adalah tempat anak belajar bersosialisasi, membentuk pola pikir, dan mengalami pengaruh guru serta teman sebaya. Lingkungan keluarga yang suportif akan membentuk karakter anak yang percaya diri dan siap belajar. Sekolah yang ramah anak dan inklusif akan memperkuat perkembangan akademik dan sosial anak. Jika salah satu unsur mikrosistem bermasalah (misalnya, konflik keluarga atau kekerasan di sekolah), maka perkembangan anak juga bisa terganggu.

b. Tujuan SRA

Untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak serta memastikan bahwa sekolah dapat mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, diperlukan kebijakan sekolah yang ramah anak. Satuan pendidikan mampu mendidik anak sehingga memiliki kemampuan untuk hidup dalam lingkungan yang ramah, menghormati satu sama lain, dan bekerja sama untuk kemajuan dan perdamaian. Diharapkan bahwa satuan pendidikan akan menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual.

c. Prinsip-Prinsip SRA

Prinsip yang dapat digunakan dalam menciptakan SRA, menurut kementrian PPPA, diantaranya adalah:

- 1) Prinsip Nondiskriminasi - Prinsip yang menegaskan bahwa setiap anak mendapatkan hak yang sama tanpa membedakan agama, ras, suku, jenis kelamin, status sosial atau latar belakang sosial, kemampuan fisik atau mental, kondisi ekonomi, serta status hukum maupun latar belakang keluarga. Prinsip non diskriminasi dalam SRA tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan, tetapi juga merupakan strategi untuk membentuk generasi yang toleran, berkeadaban, dan berkeadilan inklusif. Sehingga sekolah dapat menjadi ruang pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.
- 2) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak - Prinsip yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, harus memprioritaskan apa yang paling bermanfaat bagi anak secara fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Sekolah didorong untuk menciptakan sistem pembelajaran dan pengelolaan yang menjamin keamanan, kenyamanan dan partisipasi anak. Guru dan tenaga kependidikan dituntut untuk memahami karakteristik dan kebutuhan tumbuh kembang peserta didik, serta memperlakukan mereka secara manusiawi dan penuh dengan

kasih sayang. Lingkungan belajar dirancang agar mampu mendukung aktualisasi potensi anak sesuai dengan tahap perkembangan dan minatnya.

- 3) Prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang dalam kerangka SRA, diwujudkan melalui penyediaan lingkungan belajar yang aman, sehat, mendukung, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam praktik SRA, hak ini diimplementasikan melalui berbagai mekanisme, seperti penyediaan makan sehat di kantin sekolah, kegiatan olahraga yang terjadwal dan terpantau, lingkungan fisik yang bersih dan aman, proses pembelajaran juga disusun agar relevan dengan kebutuhan perkembangan anak, tidak membebani secara kognitif, dan memperhatikan keseimbangan antara aspek akademik, afektif dan psikomotorik. Secara substansi, prinsip ini menjadi penanda bahwa pendidikan tidak sekedar transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan manusia utuh yang memiliki daya hidup dan potensi untuk menjadi warga negara yang berdaya.
- 4) Prinsip Penghormatan terhadap Pandangan Anak - Prinsip yang mengakui bahwa anak bukan sekedar objek dalam proses pendidikan, melainkan subjek aktif yang memiliki suara, pemikiran, kemampuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan lingkungan belajarnya. Secara struktural, sekolah menyediakan forum anak, organisasi siswa, atau musyawarah kelas yang menjadi wadah bagi anak untuk menyampiakan aspirasi, mengusulkan kegiatan, hingga mengevaluasi program sekolah. Di tingkat pembelajaran, partisipasi anak tercermin dalam pendekatan *student centered learning* yang memungkinkan siswa berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses belajar. Anak-anak dilibatkan dalam kampanye anti kekerasan, kegiatan kebersihan, pembuatan kode etik bersama, serta program

lingkungan hidup sekolah. Dengan menciptakan lingkungan sekolah yang relevan dengan kebutuhan dan realitas anak, anak merasa memiliki sekolahnya, sehingga tumbuh rasa aman, nyaman dan percaya diri untuk mengembangkan potensi diri secara utuh.

- 5) Prinsip Pengelolaan yang Baik berarti sekolah menjadi ruang yang melindungi anak dari resiko kekerasan fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan berbasis digital. Sekolah memiliki sistem deteksi dini, mekanisme pelaporan, serta penanganan yang cepat terhadap kasus-kasus yang berpotensi membahayakan anak. Prinsip menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan inklusif bukan hanya menjadi syarat teknis dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi merupakan wujud konkret dari komitmen moral, legal dan profesional dalam membangun ekosistem sekolah yang berpihak pada anak. Pengelolaan yang transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan keterbukaan

Enowarsito dan Ulumudin (2019) menyatakan bahwa SRA menggunakan prinsip 3P (Provisi, Proteksi dan Partisipasi) dalam proses pendidikan.

- 1) Prinsip provisi (Pemenuhan Hak Anak) merujuk pada pemenuhan hak-hak dasar anak yang melekat sejak lahir, termasuk hak atas pendidikan, layanan kesehatan, makanan bergizi, rekreasi, informasi, dan pengembangan potensi diri. Penyediaan prasarana yang layak, materi ajar yang relevan, guru yang kompeten, serta suasana belajar yang sehat dan mendukung perkembangan optimal anak.
- 2) Prinsip Proteksi (Perlindungan Anak) menekankan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan diskriminasi pendidikan. Sekolah memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif, baik secara fisik maupun psikologis.

- 3) Prinsip Partisipasi (Peran Aktif Anak) menekankan bahwa partisipasi anak bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari proses pendidikan demokratis yang menumbuhkan kepercayaan diri, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan. Prinsip ini diwujudkan melalui pelibatan anak dalam musyawarah kelas, penyusunan tata tertib hingga evaluasi pembelajaran.

d. Ciri-ciri SRA

Menurut Kristanto dkk, dalam Bagha (2011: 48) terdapat beberapa ciri SRA yang ditinjau dari beberapa aspek :

- 1) Sikap terhadap murid

SRA ditandai dengan sikap guru dan tenaga pendidik yang menghargai keberagaman, bersikap adil, dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik. Guru menunjukkan empati, bersikap terbuka dan menjalin komunikasi positif yang membangun rasa aman dan kepercayaan diri anak. Tidak terdapat praktik kekerasan, perundungan, atau hukuman fisik maupun psikis. Setiap anak diterima sesuai dengan latar belakang dan potensi unik yang dimiliki.

- 2) Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan bersifat partisipatif, menyenangkan, kontekstual, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong eksplorasi, diskusi, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Pendekatan pembelajaran yang mengaktifkan siswa seperti pembelajaran tematik integrative, berbasis proyek, atau pendekatan saintifik, menjadi ciri khas dalam pelaksanaan pembelajaran yang ramah anak.

- 3) Media ajar

Media pembelajaran yang digunakan di SRA bersifat inklusif, bervariasi, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik siswa. Guru memanfaatkan media visual, audio, hingga digital untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan mudah dipahami oleh semua siswa. Media juga disesuaikan agar mendukung pembelajaran siswa dengan kebutuhan khusus atau berkebutuhan diferensial.

4) Partisipasi Siswa

SRA menjamin adanya ruang bagi partisipasi aktif siswa dalam proses pendidikan dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Siswa dilibatkan dalam diskusi kelas, perencanaan kegiatan, penyusunan aturan kelas, hingga forum-forum seperti organisasi siswa atau majelis perwakilan kelas. Hal ini membangun rasa tanggung jawab dan kepemilikan siswa terhadap lingkungan belajarnya.

5) Penataan Kelas

Penataan ruang kelas dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan dan kemudahan akses bagi seluruh siswa. Tata letak kursi fleksibel dan mendukung kerja kelompok atau diskusi, ruang dihiasi karya siswa, serta sudut baca atau area reflektif. Penataan tersebut menciptakan ruang belajar yang ramah, inspiratif, dan tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa.

6) Lingkungan kelas

Lingkungan kelas yang ramah anak di sekolah mencerminkan suasana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistic. Tercipta hubungan yang harmonis antara siswa dan pendidik serta antar siswa sendiri. Suasana kelas yang kondusif ditandai dengan komunikasi dua arah, bebas dari kekerasan verbal maupun fisik, serta sarat nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan empati.

e. Indikator SRA

Berdasarkan Permen PPPA no 8 Tahun 2014 tentang kebijakan pendidikan yang mendukung anak-anak, Rangkuti dan Maksum dalam Bhaga,dkk (2022:13-15) menunjukkan indicator sekolah ramah anak terdiri dari enam komponen utama:

1) Peraturan SRA

Sekolah memiliki kebijakan tertulis dan eksplisit yang mencerminkan komitmen terhadap perlindungan anak, anti perundungan, anti diskriminasi, serta mendorong partisipasi anak. Komitmen ini harus terintegrasi dalam rencana kerja sekolah dan dituangkan dalam peraturan yang diketahui dan dijalankan oleh seluruh warga sekolah.

2) Pelaksanaan Kurikulum

Kurikulum dan pembelajaran yang inklusif dan berorientasi pada anak. Proses pembelajaran dirancang agar dapat mengakomodasi kebutuhan setiap anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kurikulum yang diterapkan menekankan pada pembentukan karakter, pengembangan potensi diri, dan penguatan partisipasi siswa dalam proses belajar.

3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih dalam hak anak.

Guru dan karyawan sekolah memiliki pemahaman mengenai hak-hak seorang anak dan prinsip Pendidikan inklusif. Mereka dibekali dengan pelatihan dan pendampingan untuk menerapkan pendekatan pedagogi yang ramah terhadap anak, serta mampu membuat lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan.

4) Sarana dan perlengkapan sekolah yang ramah anak

Fasilitas sekolah, baik fisik dan non fisik harus mendukung kenyamanan dan keamanan anak, termasuk akses sanitasi yang layak, ruang kelas yang bersih, pencahayaan yang memadai,

serta lingkungan yang bebas dari potensi kekerasan atau bahaya. Selain itu, suasana psikologis di sekolah juga harus mendukung rasa aman, terbuka dan tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada siswa.

5) Partisipasi aktif anak dalam pengambilan keputusan

Anak-anak diberi ruang untuk menyuarakan pendapat, terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sekolah, serta dilibatkan dalam penyusunan tata tertib kelas. Hal ini mencerminkan prinsip partisipatif dan penghargaan terhadap otonomi anak sebagai subjek Pendidikan.

6) Orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni ikut berpartisipasi.

Sekolah bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk membuat lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak. Forum-forum seperti komite sekolah, kegiatan parenting, dan kolaborasi lintas sektor, membantu menyelaraskan pendidikan di sekolah dan di rumah.

Selain enam komponen di atas, ada komponen lain yang perlu menjadi indikator pencapaian sekolah ramah anak.

1) Budaya sekolah dan nilai-nilai positif

Lingkungan sekolah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, saling menghargai, tanggung jawab, dan kejujuran. Interaksi antara guru, siswa, dan warga sekolah lainnya berlangsung dalam suasana positif, mendukung perkembangan karakter anak, serta menghindarkan dari segala bentuk kekerasan atau intimidasi.

2) Manajemen kasus dan system perlindungan anak

Sekolah memiliki mekanisme yang jelas dan tanggap dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak anak, seperti kekerasan, perundungan, atau pelecehan. System ini meliputi pelaporan,

penanganan, dan pendampingan psikologis secara profesional, serta menjunjung kerahasiaan dan keselamatan anak.

3) Sistem monitoring dan evaluasi program ramah anak

Tersedia system evaluasi berkelanjutan untuk menilai efektivitas penerapan prinsip SRA. Evaluasi ini dilakukan secara partisipatif, melibatkan guru, siswa, dan orang tua, serta digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

SRA dapat dibangun jika sekolah, keluarga dan masyarakat bekerja sama untuk membangunnya. Keluarga sebagai organisasi terkecil yang terdekat dengan anak didik, hendaknya mampu memberikan keharmonisan dalam lingkungan keluarga, sehat secara lahir maupun batin. Kondisi yang ideal ini akan terjadi ketika sebuah keluarga mampu memenuhi beberapa kriteria antara lain:

- 1) Keluarga memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak termasuk papan, makanan, maupun sandang dan kesehatan.
- 2) Beri ruang kepada anak untuk berkreasi, berekspresi dan berpartisipasi sesuai dengan tingkat umur dan kematangannya. Juga beri ruang untuk bermain dan belajar sesuai dengan pengembangan keterampilan anak.
- 3) Memberikan anak rasa aman dan perlindungan. Anak merasa aman dengan orang tua baik secara fisik maupun psikis. Tidak ada kekerasan dan diskriminasi dari orang tua. Tidak merasa tertekan, tidak takut untuk berkomunikasi dengan orang tua sebaliknya menganggap orang tua paling memahami dan mengerti anak.
- 4) Anak akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam keluarga yang aman, harmonis dan terlindungi. Mereka juga akan memiliki kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka.
- 5) Perkembangan anak akan didukung oleh lingkungan yang aman dan nyaman. Anak akan berkembang dan memiliki kemampuan

untuk menemukan identitasnya sendiri. Dalam kerangka ini, anak akan berusaha meniru atau berbeda dari orang lain.

- 6) Komunitas yang sehat memungkinkan anak berinteraksi dan merasa aman tinggal didalamnya karena mereka menerima dan menghargai anak apa adanya.

f. Tahapan SRA

Hak-hak anak diutamakan dalam pendidikan, dan sekolah ramah anak dapat dicapai melalui lima tahap:

1) Komponen SRA di SD Verifikasi Kategori I:

Kategori I mengacu pada pemenuhan standar awal dari pelaksanaan prinsip-prinsip ramah anak yang bersifat dasar dan wajib dilaksanakan oleh sekolah. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi :

- a) Kebijakan SRA: sekolah wajib memiliki kebijakan yang mendukung terwujudnya SRA, baik tertulis maupun dalam bentuk komitmen dari pimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan dan orang tua. Kebijakan ini mencakup diskriminasi, perundungan, kekerasan, serta pemenuhan hak partisipasi anak. Komitmen yang didokumentasikan dalam bentuk fakta integritas melakukan upaya untuk mencegah anak putus sekolah, melindungi, memenuhi dan memastikan bahwa hak anak beribadah sesuai keyakinan. Menggabungkan materi lingkungan hidup dan kesehatan dalam proses pembelajaran. Ramah anak telah dimasukkan kedalam visi, misi, dan tata tertib sekolah.
- b) Pelaksanaan Proses Pembelajaran: proses pembelajaran yang dilaksanakan hendaknya (1) tidak bias gender, (2) tidak diskriminasi, (3) memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif tentang masyarakat dan budaya local, (4) tidak mengandung kekerasan dalam materi buku ajar. (5) disediakan fasilitas di lantai untuk anak-anak di kelas

pertama dan kedua untuk menciptakan suasana santai dan mempererat hubungan guru dan siswa, (6) siswa terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat, (7) dapat menumbuhkan wawasan dan rasa kebangsaan .

- c) Penilaian hasil belajar yang berkaitan dengan hak anak harus dilakukan melalui proses dan menggunakan evaluasi.
- d) Sarana dan Prasarana yang Ramah : sarana dan prasarana hendaknya memenuhi komponen berikut :
- e) Partisipasi anak; siswa diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, seperti komunitas pelajar anti kekerasan.
- f) Orang tua/ wali menyekolahkan anak dekat dengan tempat kerja orang tua.

2) Komponen SRA di SD Verifikasi Kategori II:

- a) Kebijakan SRA; kebijakan anti kekerasan dibentuk oleh SK internal sekolah dan tim pengembangan SRA yang telah bergabung dengan gugus tugas KLA . semua warga terlibat dalam penyusunan kebijakan ini. kebijakan anti kekerasan mencakup larangan; penghapusan tindakan kekerasan atau diskriminasi antar siswa dan orang lain; dan hukuman fisik (seperti memukul, menampar dengan tangan, cambuk, tongkat, ikat pinggang, sepatu, balok, kayu dll.) menendang, melempar, menggaruk, mencubit, menjambak, menarik telinga, memaksa siswa untuk duduk. Hukuman tambahan yang merendahkan martabat siswa serta hukuman lainnya yang merendahkan hak pelajar untuk belajar, seperti mengeluarkan siswa untuk sekolah karena terlambat atau alasan lainnya.

- b) Mekanisme Pengaduan; sekolah berusaha membuat sistem pengaduan untuk menangani kasus pelanggaran hak anak seperti kekerasan dan kejahatan seksual. Implementasi kebijakan anti kekerasan terhadap anak, melalui penerapan disiplin non kekerasan, pelatihan disiplin positif, dan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi guru dan staf pendidikan. Memiliki komitmen untuk menciptakan sekolah yang tidak merokok. Memiliki komitmen yang tidak melibatkan napza. Sekolah aman dari bencana secara struktural dan non struktural
- c) Proses Pembelajaran; Guru mendorong anak untuk ikut serta dalam kegiatan seni dan budaya selama proses pembelajaran. Baik di dalam kelas maupun di luar kelas, diterapkan kebiasaan yang peduli, toleran, gotong royong, cinta lingkungan, ramah dan sopan. Akibat hak anak, penilaian hasil belajar tidak membandingkan satu per satu antar anak.
- d) Tenaga Kependidikan; seluruh warga sekolah dimulai dari guru, tenaga kependidikan, tata usaha, petugas kebersihan, penjaga sekolah, komite satuan Pendidikan, pembimbing ekstrakurikuler dan orang tua, hendaknya diberikan pelatihan terkait hak-hak anak.
- e) Sarana dan Prasarana; ada sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi dengan rambu pengarah ke tempat kumpul yang aman. Kondisi toilet bersih, lantainya tidak licin, dan ada wastafel yang layak dengan air bersih. Ada sabun cuci tangan. Alat permainan edukatif (APE) yang memenuhi SNI memiliki simbol SRA seperti dilarang merokok, dilarang pelecehan, tanda titik pertemuan laki-laki, perempuan, disabilitas dll.

- f) Partisipasi Anak; ini berarti bahwa anak-anak terlibat dalam membuat peraturan dan tata tertib di sekolah dan ruang kelas. Menambahkan perwakilan anak ke tim pelaksana SRA.
- g) Partisipasi orangtua/wali, Lembaga Masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

3) Komponen SRA di SD Verifikasi Kategori III:

Standar nasional SRA sudah tercapai

Memenuhi tahap 1&2. Mempekerjakan guru piket, piket anak untuk memantau perlindungan anak secara teratur. Mekanisme pengaduan (didampingi Forum SRA), termasuk penanganannya, sudah berjalan. pembelajaran kelas ramah anak dengan minimal satu guru terlatih). Orangtua mengawasi pendidikan anak dengan memberikan waktu dua puluh menit untuk mendengarkan curhat anak, ada komunikasi yang intens antara guru dan orang tua (melalui social media dan buku komunikasi), dansarana dan prasarana yang memadai.

- a) Kebijakan SRA; kebijakn anti kekerasan yang tersedia termasuk pengaduan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak termasuk kekerasan dan kejahatan seksual: pencegahan dan penanganan semua jenis kejahatan seksual dan kekerasan terhadap peserta didik termasuk fisik atau mental, perlakuan salah, penelantaran atau perlakuan menelantarkan atau eksploitasi; peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran seluruh warga satuan pendidikan tentang bahaya kejahatan seksual dan kekerasan..
- b) Menjamin bahwa siswa memiliki akses yang layak ke layanan pendidikan yang inklusif melalui inisiatif sekolah utnuk memerangi perundungan dan memberikan pelatihan kesehatan kepada anak penyandng disabilitas tentang cara

memberikan perlindungan. Pendisiplinan non kekerasan mengganti hukuman dengan tugas sekolah atau keterampilan tambahan.

- c) Proses Penyadaran dan dukungan satuan Pendidikan; sekolah melakukan proses penyadaran dan dukungan untuk memahami konvensi hak anak, gender, dan anak yang membutuhkan perlindungan anak secara teratur. Pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang, dan siswa tidak dilayani dengan cara yang diskriminatif baik didalam maupun di luar sekolah. Dengan memberikan pengalaman belajar dan metode pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi siswa. Motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan seni dan budaya. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengatur, mengikuti, dan mengapresiasi aktivitas seni dan budaya. Memiliki kelas yang ramah anak, dengan setidaknya satu guru yang berpengalaman.
 - d) Sarana dan prasarana;
 - e) Guru dan tenaga kependidikan; guru dan tenaga terlatih Hak Anak mempunyai working grp WA
 - f) Partisipasi anak; usulan siswa untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta rekomendasi RKAS untuk mewujudkan SRA didengar dan dipertimbangkan oleh guru, tenaga kependidikan dan komite sekolah
 - g) Partisipasi orangtua/wali, Lembaga Masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.
- 4) Komponen SRA di SD Verifikasi Kategori IV:
- Standar Nasional SRA sudah tercapai. Sudah memenuhi tahap 1,2 dan 3. Kebijakan SRA terintegrasi dalam RKAS dan anak

terlibat dalam perencanaan dan pemantauan. Forum SRA membantu SOP mekanisme pengaduan.

- a) Kebijakan SRA; Menjamin pelaksanaan kebijakan anti kekerasan terhadap siswa melalui pemantauan, pengawasan dan tindakan pemulihan. Melakukan komitmen tahunan untuk menerapkan SRA dalam RKAS dan manajemen berbasis sekolah. Tersedianya tenaga konseling / BP3 yang terlatih tentang Konvensi Hak Anak. Mengembangkan sistem rujukan untuk sekolah yang sudah siap untuk menerapkan pendidikan inklusi.
 - b) Memanfaatkan pendekatan Pembelajaran yang ramah anak dalam kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok dapat membantu mengembangkan minat, bakat, inovasi dan kreativitas siswa. Memiliki kelas yang ramah anak.
 - c) Guru dan tenaga kependidikan yang terlatih Hak Anak mempunyai *working group*.
 - d) Sarana dan Prasarana SRA,
 - e) Partisipasi Anak; untuk mendukung SRA, siswa dilibatkan dalam proses penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). siswa juga aktif menilai pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS
 - f) Partisipasi orangtua/wali, Lembaga Masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.
- 5) Komponen SRA di SD Verifikasi Kategori V:
- Standar Nasional SRA sudah tercapai.* Ada kebijakan sekolah untuk membuka kelas layanan khusus bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus dan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial anak (PMKSA) dan telah siap menjadi sekolah rujukan untuk SRA. Ada kelompok kerja SRA untuk guru dan tenaga yang terlatih hak anak. Setiap siswa telah

mengambil tindakan untuk memastikan hak dan perlindungan anak. Anak-anak sudah berani melakukan pengaduan. Sekolah memiliki prosedur pengaduan, formulir yang digunakan, penerima pengaduan dan verifikasi masalah atau informasi, tindakan setelah penerimaan, pengawasan, evaluasi penanganan dan pemulihan pengaduan..

- a) Kebijakan SRA; ada kebijakan anti kekerasan terhadap siswa, sistem pengaduan, dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Ada upaya pemulihan, pengaduan diawasi dan dievaluasi. Ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus dan / atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA), serta menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki pengaruh minimal pada sepuluh sekolah disekitarnya..
- b) Proses Pembelajaran yang ramah anak; semua kelas sudah ramah anak, guru dan tenaga kependidikan yang terlatih Hak Anak memiliki *working group* (Pokja SRA), siswa berani dan bisa mengadukan masalah.

3. Pendidikan untuk Semua (*Education for All*)

Strategi kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah anak tidak dapat dilepaskan dari kerangka berpikir *Education for All (EFA)*. Sebagai komitmen global yang menekankan inklusivitas, kesetaraan, dan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali, EFA menjadi pijakan filosofis sekaligus arah strategis bagi kepemimpinan sekolah dalam mengembangkan kebijakan yang menjamin hak setiap anak untuk belajar dalam suasana yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan holistik mereka.

Komitmen terhadap prinsip *Education for All (EFA)* menjadi kerangka normatif sekaligus arah strategis dalam kepemimpinan kepala

sekolah dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran yang ramah anak. EFA mengamanatkan setiap lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa diskriminasi apa pun, memperoleh akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas dan inklusif. Prinsip ini sejalan dengan paradigma pendidikan ramah anak, yang menekankan pada perlindungan hak, penghargaan atas perbedaan, serta pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan intelektual peserta didik.

Strategi kepala sekolah disusun melalui tiga tahapan utama: formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi, yang keseluruhannya didasarkan pada hasil pemindaian lingkungan internal dan eksternal sekolah. Setiap tahapan mencerminkan upaya sadar dan sistematis dalam menjadikan sekolah sebagai ruang belajar yang aman, inklusif, dan partisipatif, sesuai dengan prinsip *Education for All*.

a. Formulasi Strategi: Penanaman Nilai Inklusivitas dan Keadilan Pendidikan

Formulasi strategi dimulai dari perumusan visi dan misi sekolah yang diarahkan pada pencapaian pendidikan yang adil dan merata. Kepala sekolah mengintegrasikan nilai-nilai EFA ke dalam perencanaan strategis melalui:

- 1) Penetapan tujuan jangka panjang yang menekankan pemerataan akses pendidikan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak dari latar belakang rentan.
- 2) Penyusunan strategi pembelajaran yang menitikberatkan pada pendekatan diferensiasi, partisipatif, dan humanistik.
- 3) Pengembangan program sekolah yang responsif terhadap kebutuhan siswa, seperti program literasi, penguatan karakter, dan pembiasaan ramah anak.

Pendekatan ini memperlihatkan adanya kesinambungan antara prinsip *Education for All* dan kerangka manajemen strategis dalam

dunia pendidikan (Wheelen & Hunger, 2012), di mana proses perencanaan didasarkan pada analisis SWOT dan berorientasi pada pemenuhan hak belajar semua peserta didik.

b. Implementasi Strategi: Penerapan Kebijakan dan Program Ramah Anak

Pada tahap implementasi, kepala sekolah berperan sebagai penggerak transformasi budaya sekolah. Strategi yang dijalankan mencerminkan keberpihakan pada hak anak dan semangat EFA, antara lain:

- 1) Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung inklusi, seperti aksesibilitas fisik, ruang kelas ramah disabilitas, dan pojok konseling siswa.
- 2) Melakukan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik terkait pedagogi ramah anak, pembelajaran diferensiasi, dan manajemen kelas yang positif.
- 3) Membangun prosedur penanganan kekerasan, perundungan, dan diskriminasi berbasis gender atau latar belakang lainnya.
- 4) Mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat melalui forum sekolah, kampanye hak anak, serta kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak.

Langkah-langkah ini tidak hanya menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan strategi, tetapi juga memperlihatkan kepemimpinan transformasional kepala sekolah yang mendorong perubahan budaya dan sistem menuju pendidikan inklusif yang berkeadilan (Leithwood et al., 2004).

c. Evaluasi Strategi: Mengukur Efektivitas dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak

Evaluasi strategi dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana tujuan EFA telah diinternalisasikan dalam praktik sekolah. Evaluasi mencakup:

- 1) Penilaian ketercapaian program ramah anak dan keberhasilannya dalam meningkatkan akses dan keterlibatan siswa.
- 2) Pengukuran iklim sekolah dari perspektif siswa, guru, dan orang tua.
- 3) Refleksi dan tindak lanjut atas laporan kasus kekerasan, diskriminasi, atau hambatan belajar.

Evaluasi ini menunjukkan adanya *feedback loop* yang penting dalam manajemen strategi, di mana informasi dari hasil pelaksanaan digunakan untuk perbaikan kebijakan, penyesuaian program, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Konsep *Education for All* yang berlandaskan pada Deklarasi Dakar (UNESCO, 2000) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya SDG-4, memberikan penguatan teoretis bahwa pendidikan harus menjangkau semua anak, termasuk kelompok rentan. Dalam praktiknya, kepala sekolah sebagai aktor strategis perlu memastikan bahwa:

- a. Tidak ada anak yang tertinggal karena hambatan fisik, sosial, atau kultural.
- b. Setiap anak dihargai potensinya secara unik dan diberikan ruang untuk berkembang.
- c. Proses pendidikan dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan, aman, dan penuh penghargaan terhadap martabat anak.

Dengan menjadikan EFA sebagai dasar strategis, kepala sekolah secara aktif mentransformasi sekolah menjadi institusi pembebas yang tidak sekadar mengajar, tetapi juga membentuk keadilan sosial bagi anak-anak di dalamnya (Friere dalam Zuhdi; 2024)

C. Landasan Kebijakan

1. Regulasi pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa “setiap anak yang berada di dalam maupun di sekitar lingkungan satuan Pendidikan berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, kejahatan seksual, maupun tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan oleh Guru, tenaga kependidikan, sesama anak, atau pihak lain”. Selain itu, setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatannya berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan tidak adil, termasuk:

- a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; serta
 - f. Perlakuan salah lainnya.
2. Regulasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan untuk tingkat PAUD, Dasar dan Menengah.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015, dijelaskan bahwa tindak kekerasan mencakup perilaku yang dilakukan secara fisik, psikologis, seksual, maupun melalui media daring atau bahan ajar yang mengandung unsur agresi dan penyerangan. Tindakan ini dapat terjadi di lingkungan satuan Pendidikan dan berpotensi menimbulkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka atau cedera, cacat, hingga kematian. Pasal 2 dalam peraturan ini menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan Pendidikan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- b. Melindungi seluruh warga sekolah dari tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun; serta;

- c. Membangun interaksi yang harmonis dan sikap saling menghormati antara anak, Guru, tenaga kePendidikan, orang tua, serta masyarakat, baik di dalam satuan Pendidikan maupun antar satuan Pendidikan.

Sementara itu, Pasal 3 menjelaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan Pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah maupun dalam kegiatan sekolah yang berlangsung di luar sekolah;
 - b. Mencegah anak agar tidak terlibat dalam perilaku kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun dalam aktivitas sekolah di luar satuan Pendidikan; serta;
 - c. Menyediakan mekanisme yang jelas dalam hal pencegahan, penanganan, serta pemberian sanksi terhadap tindakan kekerasan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.
3. Regulasi Peraturan Menteri Perdayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Dalam peraturan menteri ini, ditegaskan bahwa hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah dan negara.

Dalam pasal 2 tujuan kebijakan sekolah Ramah anak “Kebijakan Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk memastikan setiap anak terpenuhi hak-haknya dan dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, serta dijamin partisipasinya di lingkungan sekolah.”. Sekolah Ramah Anak adalah lingkungan Pendidikan—baik formal, nonformal, maupun informal—yang aman, bersih, sehat, serta peduli terhadap lingkungan. Sekolah ini harus mampu menjamin, memenuhi, dan menghargai hak-hak anak, serta melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Selain itu, Sekolah Ramah Anak juga mendorong partisipasi anak dalam

berbagai aspek, seperti perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, hingga mekanisme pengaduan yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak di dunia Pendidikan.

4. Regulasi Permendikbudristek No. 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan

Regulasi yang memperkuat pentingnya sekolah ramah anak, di pertegas dalam pasal 2 “Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.” Pasal ini menjadi dasar kuat bahwa lingkungan sekolah harus ramah, inklusif, dan tidak diskriminatif—nilai inti dari Sekolah Ramah Anak.

Tidak hanya sekolah, namun perlu keterlibatan berbagai pihak untuk dapat terselenggaranya sekolah yang ramah anak, seperti tertuang dalam Pasal 5 “Pencegahan Kekerasan dilakukan melalui:

- a. penguatan tata kelola satuan pendidikan;
- b. penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pelibatan peserta didik dan orang tua/wali peserta didik...”

Keterlibatan anak, guru, orang tua, dan tata kelola yang mendukung sangat sejalan dengan pendekatan partisipatif dalam SRA.

Untuk dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah anak, maka perlu adanya kebijakan yang ditetapkan oleh kepala sekolah, seperti yang ditegaskan dalam pasal 6 “Satuan pendidikan wajib menyusun dan menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan.” Sekolah Ramah Anak mengharuskan sekolah memiliki kebijakan internal perlindungan anak dan upaya preventif terhadap kekerasan. Untuk dapat berjalannya system ini maka perlu nya di bentuk Tim Satuan khusus yang menangani kekerasan di sekolah, tertuang pada pasal 9 dan 10 yang Membahas tentang pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang melibatkan perwakilan peserta didik, guru, dan orang tua. Menunjukkan prinsip kolektif dan pelibatan semua warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah.

5. Regulasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Menurut Peraturan Daerah Jawa Barat No. 5 tahun 2017, tujuan penyelenggaraan Pendidikan di provinsi adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter warga Jawa Barat untuk peradaban bangsa yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi anak untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang "*Cageur, Bageur, bener, pinter, tur siger*". penyelenggaraan Pendidikan berpedoman pada falsafah Jawa Barat, yaitu "*silih asih, silih asah, silih asuh, silih wawangi*". Dalam pasal 7, tujuan penyelenggaraan Pendidikan adalah untuk mencapai tatakelola yang berkualitas, yang mencakup semua aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan.

6. Regulasi Permendikbud No 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Dalam Pasal 5 menyatakan bahwa PPK diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi sekolah, keluarga, masyarakat. Sekolah sebagai penyelenggara utama pendidikan formal. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama pembentukan karakter anak. Masyarakat sebagai lingkungan yang mendukung dan memperkuat nilai-nilai yang ditanamkan di keluarga dan sekolah. Kemitraan ini penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, karena melibatkan semua pihak yang berperan dalam perkembangan anak.

7. PP No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam pasal 50 ayat (5) pasal ini menyatakan bahwa satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan yang ?Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan

kemampuannya”Ketentuan ini mendukung penerapan pembelajaran diferensial, di mana guru menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Pasal 91 ayat (1) menyatakan penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus. Pasal ini menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus bagi peserta didik yang memiliki Potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, Gangguan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan tertentu. Ketentuan ini mendukung prinsip pembelajaran diferensial dengan menyediakan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian disertasi ini bukan penelitian baru, melainkan melanjutkan dari para peneliti sebelumnya, yang memiliki arah pemikiran yang selaras. Berdasarkan penelusuran pada beberapa literatur dalam karya ilmiah, terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dari para penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran dan ramah anak. Adapun yang membedakan adalah focus kajian dan setting lokasi. Adapun penelitian yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akbaresti, D.H (2019) dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran Ramah Anak di SD Negeri Percobaan 3 Pakem”. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada sekolah dasar di Yogyakarta. Penelitian ini menemukan bahwa perencanaan Pembelajaran telah sesuai dengan kebutuhan materi dan karakter anak. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan. Pada tahap penilaian, siswa dievaluasi bukan hanya untuk pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan anak. Hal yang harus diperhatikan adalah peran kepala

sekolah sebagai pengawas, guru harus lebih memperhatikan anak dalam menggunakan hak nya. Guru lebih menekankan komitmen anti kekerasan sesuai dengan yang telah disepakati, dan guru harus membangun hubungan dengan anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arif, W. dengan judul “ Strategi Kepala Sekolah dalam Pembinaan Budaya Religius” penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui strategi yang di gunakan oleh kepala sekolah dalam pembinaan budaya religius di SMPN 13 Palopo. Penelitian kualitatif dengan pendekatan pedagogic, manajemen dan Psikologi, menghasilkan informasi bahwa strategi kepala sekolah dalam pembinaan budaya religius di SMPN 13 Palopo, dari sisi manajemen telah dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pembinaan budaya religius di sekolah yakni 1) melalui pemindaian lingkungan internal, eksternal, lingkungan sosial serta sumber daya kultur; 2) perumusan strategi; 3) implementasi startegi; 4) monitoring dan evaluasi. Faktor pendukunng pembinaan religius di SMPN 13 Palopo ialah adanya kepercayaan orang tua siswa yang tinggi terhadap lembaga satuan pendidikan, adanya kerjasama yang abik antara kepala sekolah, guru dalam suport kegiatan-kegiatan sekolah. Adapun hambatannya adalah sarana dan prasarana.
3. Studi Yosada,K.R. dan Kurniati, A. (2019) dengan judul “Menciptakan Sekolah Ramah Anak” menggunakan pendekatan studi pustaka kualitatif. menyimpulkan bahwa sekolah ramah anak diperlukan untuk melindungi hak-hak anak, memberikan lingkungan yang nyaman bagi anak, memungkinkan mereka memaksimalkan potensi mereka, dan menghasilkan output yang baik. Salah satu model pembelajaran yang paling cocok adalah model pembelajaran yang ramah guru dan ramah anak. Pertama, model ini menciptakan suasana hati yang sehat antara guru dan anak, di mana semua masalah yang berkaitan dengan anak diselesaikan dengan santai. Kedua, anak-anak memiliki prasangka yang lebih baik. Ketiga guru menyadari bahwa anak-anak memiliki potensi yang luar biasa

dan perlu dilatih untuk mengembangkannya. Pendekatan motivasi, bukan pemaksaan keinginan guru, adalah keempat dari pendekatan pembelajaran yang ramah anak dan ramah guru. Kelima, mengajar anak dengan kasih sayang. Kekerasan tidak cocok untuk mendidik anak. Tidak peduli apa alasannya

4. Penelitian yang digagas oleh Baharun, H. dkk (2021) dengan mengangkat judul “Kepemimpinan Perempuan dalam Menciptakan Sekolah Ramah Anak” di Raudhatul Athfal (RA) Nurul Salam, Kota Anyar Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pertama di RA Nurul Salam adalah seorang perempuan yang ingin menciptakan sekolah ramah anak. Kedua, RA Nurul Salam telah menerapkan sekolah ramah anak melalui tahapan berikut: Analisis SWOT, Branding School, pengembangan SRA dan perbaikan berkelanjutan. Dengan menerapkan SRA di RA Nurul Salam, pembelajaran menjadi lebih kondusif dan wali murid lebih percaya pada guru.
5. Studi dengan judul *“Peran Kepala Sekolah Terhadap Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri di Kota Makassar”* oleh Jahidin, U.H. dan Torro, S Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran kepala sekolah dalam implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri Kota Makassar, serta faktor pendorong dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memainkan lima peran utama: sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, dan leader. Faktor pendorong keberhasilan SRA di antaranya adalah kesadaran warga sekolah dan kelanjutan dari program sebelumnya. Sementara itu, hambatan yang dihadapi mencakup peran ganda kepala sekolah dalam banyak kegiatan dan keterbatasan alokasi dana. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada hak-hak anak,

serta perlunya dukungan sistemik dan alokasi anggaran yang memadai agar program SRA dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Rafika Dewi dan Muhamad Sholeh (2021) “ Strategi Kepala Sekolah dalam Implementasi Program Sekolah ramah Anak”. Artikel ini membahas pentingnya peran kepala sekolah dalam mengimplementasikan program Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya melindungi dan memenuhi hak-hak anak di lingkungan pendidikan. Mengacu pada studi literatur dari berbagai jurnal dan buku, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program SRA sangat ditentukan oleh strategi kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pendidik dan manajer, tetapi juga sebagai pemimpin dan pengawas yang menetapkan arah kebijakan dan mengelola sumber daya sekolah. Strategi implementasi SRA mencakup enam aspek utama, yaitu: merumuskan kebijakan ramah anak, mengawasi kurikulum, menyelenggarakan pelatihan guru, menyediakan sarana prasarana yang aman dan mendukung, memberi ruang partisipasi siswa, serta melibatkan orang tua dan masyarakat. Dengan strategi ini, kepala sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.
7. Studi yang dilakukan oleh Adindo, A.W. dan Sari, A.F. (2025) berjudul” *“Strategy and Impact of Child-Friendly School Implementation at SDN 1 Kleco”*. Penelitian ini mengkaji implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di SDN 1 Kleco dengan fokus pada strategi, tantangan, dan dampaknya. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan seperti keterbatasan fasilitas dan pemahaman guru yang bervariasi, strategi seperti pelatihan guru, pembentukan tim khusus, pembelajaran interaktif, dan keterlibatan orang tua berhasil menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter anak. Program ini meningkatkan motivasi belajar, rasa percaya diri, serta hubungan harmonis antara guru dan siswa, namun keberlanjutan SRA

masih memerlukan dukungan anggaran, pelatihan berkelanjutan, dan kolaborasi aktif dari berbagai pihak.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Huda, S., Istofa, D.N., & Farida (2021) dengan judul “Strategi Penyelenggaraan Program Sekolah Ramah Anak: Analisis Peran Kepala Sekolah di SD Tanjung Jabung Timur Jambi” Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi kepala sekolah dalam menyelenggarakan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SDN 99/X Sidomukti, Jambi, menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan sentral dalam merancang strategi penyelenggaraan program SRA melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sesuai dengan enam indikator kebijakan SRA: kebijakan sekolah, pelaksanaan pembelajaran ramah anak, sarana prasarana, pendidik terlatih hak anak, partisipasi anak, serta partisipasi orang tua dan masyarakat. Strategi mencakup integrasi program SRA ke dalam RKAS, kerja sama dengan pihak eksternal (seperti kepolisian dan BNN), serta penguatan budaya anti kekerasan melalui regulasi internal dan poster edukatif. Meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan kurangnya pelatihan guru, komitmen kolektif seluruh warga sekolah menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan menghargai hak anak.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih, D (2022) berjudul "Implementasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan" dilatarbelakangi oleh fenomena mutu pendidikan yang terus berubah dan berubah, serta spesifikasi dan kualifikasi yang terus meningkat seiring perkembangan zaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menerapkan strategi manajemen dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Di Sekolah Dasar Islam *de Green Camp* di Tanjungpinang, penelitian ini dilakukan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen di

SD Islam *De Green Camp* telah digunakan dan berfokus pada meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) strategi manajemen SD Islam *De Green Camp* dimulai dengan perumusan visi dan misi yang melibatkan semua elemen yang ada di sekolah; (2) SD Islam *De Green Camp* memiliki kualitas layanan pendidikan yang baik, yang tercermin dalam konsep pendidikan yang ramah anak; (3) SD Islam *De Green Camp* memiliki lingkungan pendidikan yang baik, yang mencerminkan sekolah Islam; dan (4) SD Islam *De Green Camp* memiliki lingkungan pendidikan yang baik, yang mencerminkan sekolah Islam.

Tabel. 2.2 Sintesis Penelitian

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Akbaresti, D.H (2019)	“Pelaksanaan Pembelajaran Ramah Anak di SD Negeri Percobaan 3 Pakem”	Penelitian ini berfokus pada manajemen pembelajaran yang di lakukan di sekolah Dasar di Daerah Yogyakarta	Menggunakan kualitatif dengan studi kasus, dan sama-sama dilakukan di tingkat Sekolah dasar.
2	Sudirjo, E.(2016)	“Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Konsep Sekolah Ramah Anak”	Berfokus pada model pembelajaran inovatif berbasis konsep sekolah ramah anak	Di lakukan di Sekolah Dasar, wilayah Jawa Barat, dengan pendekatan kualitatif,
3	Yosada,K.R. dan Kurniati, A. (2019)	“Menciptakan Sekolah Ramah Anak”	Menggunakan Studi Literatur	Pengamatan sekolah ramah anak
4	Baharun,H. dkk (2021)	“Kepemimpinan Perempuan dalam Menciptakan Sekolah Ramah Anak” di Raudhatul Athfal (RA) Nurussalam, Kota Anyar	Pengamatan kepada sosok / kepemimpinan dari kepala sekolah	Menggunakan analisis SWOT dalam menciptakan Sekolah Ramah Anak

		Probolinggo.		
5	Jahidin, U.H. dan Torro, S Tahun 2024.	“Peran Kepala Sekolah Terhadap Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri di Kota Makassar”	Peran / kepemimpinan kepala sekolah dan di SMP	Pengamatan sekolah ramah anak
6	Dewi, R.R. dan Sholeh, M. (2021)	“Strategi Kepala Sekolah dalam Implementasi Program Sekolah ramah Anak”.	Menggunakan Studi Literatur	Mengamati strategi kepala sekolah
7	Adindo, A.W. dan Sari, A.F. (2025)	<i>“Strategy and Impact of Child-Friendly School Implementation at SDN 1 Kleco”</i>	Mengamati strategi dan dampak nya, tidak mengamati dari mulai visi hingga evaluasi	Menggunakan kualitatif, di SD, mengamati strategi.
8	Huda, S., Istofa, D.N., & Farida (2021)	“Strategi Penyelenggaraan Program Sekolah Ramah Anak: Analisis Peran Kepala Sekolah di SD Tanjung Jabung Timur Jambi”	Pengamatan 6 Komponen SRA	Menggunakan kualitatif, di SD, mengamati strategi.
9	Setyaningsih, D (2022)	“implementasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan”	Hanya berfokus pada implementasi manajemen strategi	Menggunakan kualitatif, di SD, mengamati strategi.

